

**KAUSALITAS PENERIMAAN, BELANJA DAN
PDRB KABUPATEN/KOTA DI INDONESIA
(Studi Kasus Periode 2001- 2008)**



SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat
untuk menyelesaikan Program Sarjana (S1)
pada Program Sarjana Fakultas Ekonomi
Universitas Diponegoro

Disusun oleh :

**EKA PARMAWATI
NIM. C2B005165**

**FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS DIPONEGORO
SEMARANG
2010**

PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama Penyusun : Eka Parmawati
Nomor Induk Mahasiswa : C2B005165
Fakultas/Jurusan : Ekonomi / IESP
Judul Skripsi : **KAUSALITAS PENERIMAAN, BELANJA
DAN PDRB KABUPATEN/KOTA DI
INDONESIA (Studi Kasus Periode 2001-2008)**

Dosen Pembimbing : Dr. Hadi Sasana, SE., M.Si

Semarang, 03 Desember 2010

Dosen Pembimbing,

(Dr. Hadi Sasana, SE., M.Si)

NIP. 196901211997021001

PENGESEAHAN KELULUSAN UJIAN

Nama Penyusun : Eka Parmawati
Nomor Induk Mahasiswa : C2B005165
Fakultas/Jurusan : Ekonomi / IESP

Judul Skripsi : **KAUSALITAS PENERIMAAN, BELANJA
DAN PDRB KABUPATEN/KOTA DI
INDONESIA (Studi Kasus Periode 2001-2008)**

Telah dinyatakan lulus ujian pada tanggal **13 Desember 2010** 2010

Tim Penguji :

1. Dr. Hadi Sasana, SE., M.Si (.....)
2. Prof. Dr. FX. Sugiyanto, MS (.....)
3. Achma Hendra S, SE., M.Si (.....)

PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini saya, Eka Parmawati, yang menyatakan bahwa skripsi dengan judul : **KAUSALITAS PENERIMAAN, BELANJA DAN PDRB KABUPATEN/KOTA DI INDONESIA (Studi Kasus Periode 2001-2008)**, adalah hasil tulisan saya sendiri. Dengan ini saya menyatakan dengan sesungguhnya bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat keseluruhan atau sebagian tulisan orang lain yang saya ambil dengan cara menyalin atau meniru dalam bentuk rangkaian kalimat atau simbol yang menunjukkan gagasan atau pendapat atau pemikiran dari penulis lain, yang saya akui seolah-olah sebagai tulisan saya sendiri, dan/atau tidak terdapat bagian atau keseluruhan tulisan yang saya salin, tiru, atau yang saya ambil dari tulisan orang lain tanpa memberikan pengakuan penulis aslinya.

Apabila saya melakukan tindakan yang bertentangan dengan hal tersebut di atas, baik disengaja ataupun tidak, dengan ini saya menyatakan menarik skripsi yang saya ajukan sebagai hasil tulisan saya sendiri ini. Bila kemudian terbukti bahwa saya melakukan tindakan menyalin atau meniru tulisan orang lain seolah-olah hasil pemikiran saya sendiri, berarti gelar dan ijasah yang telah diberikan oleh universitas batal saya terima.

Semarang, Desember 2010

Yang membuat pernyataan,

(Eka Parmawati)

NIM. C2B005165

ABSTRAKSI

Otonomi daerah dan desentralisasi fiskal mempunyai tujuan untuk menciptakan suatu kemandirian daerah. Tidak semua daerah mempunyai kesiapan yang sama dalam menciptakan kemandiriannya, dikarenakan rendahnya pendapatan yang diperoleh dari daerah itu sendiri (PAD). Untuk mengatasi permasalahan ini, pemerintah pusat memberikan dana perimbangan/dana transfer kepada pemerintah daerah yang dimaksudkan untuk memacu pertumbuhan output daerah (PDRB). Dana perimbangan pemerintah pusat sebagian besar terdiri atas dana alokasi dan dana bagi hasil.

Tujuan penelitian ini adalah apakah terjadi hubungan kausalitas pada komponen-komponen dalam variabel penerimaan, belanja dan PDRB di kabupaten/kota seluruh Indonesia. Dalam penelitian ini juga membahas sifat hubungan ketiga variabel tersebut, apakah searah, timbal balik atau tidak ada hubungan kausalitas sama sekali.

Penelitian ini dilakukan dengan metode uji kausalitas Granger yang diolah menggunakan alat analisis Eviews 6.0. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terjadi hubungan dua arah antara variabel penerimaan terhadap belanja dan terjadi hubungan kausalitas satu arah antara variabel belanja terhadap PDRB, akan tetapi pada variabel penerimaan terhadap PDRB tidak terjadi hubungan kausalitas. Terbuktinya hubungan kausalitas dua arah antara penerimaan terhadap belanja menunjukkan bahwa belanja daerah sangat tergantung dari besarnya penerimaan daerah, dalam hal ini adalah Dana Alokasi, atau sebaliknya, besarnya Dana Alokasi tersebut dapat diprediksi dengan besarnya anggaran belanja yang diprogramkan oleh pemerintah daerah. Adanya hubungan satu arah antara belanja terhadap PDRB menunjukkan bahwa belanja daerah meningkat akan menstimulus peningkatan PDRB, tetapi peningkatan PDRB belum tentu meningkatkan belanja daerah. Tidak adanya hubungan kausalitas antara penerimaan terhadap PDRB ditunjukkan pada variabel Dana Bagi Hasil. Hal ini berarti pemerintah daerah sangat menggantungkan penerimaan daerahnya dari dana perimbangan dan kurang merespon dana perimbangan tersebut dalam meningkatkan PDRB.

Kata kunci: Kausalitas, Dana Perimbangan, Belanja Daerah, output daerah (PAD dan PDRB).

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Alhamdulillah rabbil'alamin, puji syukur kehadirat Allah SWT. yang telah memberikan segala limpahan karuniaNya sehingga penyusunan skripsi ini yang berjudul “ Kausalitas Penerimaan, Belanja dan PDRB Kabupaten/Kota di Indonesia (Studi Kasus Periode 2001-2008) berjalan dengan lancar.

Penulisan skripsi ini dimaksudkan untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam rangka menyelesaikan studi dan untuk memperoleh gelar Sarjana Strata-1 di Program Studi Ilmu Ekonomi Studi dan Pembangunan, Fakultas Ekonomi, Universitas Diponegoro.

Dalam penyusunan skripsi ini penulis banyak mendapat bimbingan, bantuan, saran, serta dukungan dan do'a dari berbagai pihak, oleh karena itu penulis mengucapkan banyak terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu selama penyusunan hingga selesainya skripsi ini, khususnya kepada:

1. Bapak H. Chabachib, S.E., M.Si. Akt. selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro.
2. Bapak Arif Pujiyono, S.E., M.Si selaku dosen wali atas bimbingan dan pengarahannya.
3. Bapak Dr. Hadi Sasana, S.E., M.Si selaku dosen pembimbing yang banyak membantu, memberikan bimbingan, nasehat dan saran yang terbaik bagi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
4. Para dosen di Fakultas Ekonomi khususnya Program Studi Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan yang tidak dapat disebutkan satu persatu atas seluruh ilmu dan pengetahuan yang telah diberikan.
5. Semua Staf Administrasi dan karyawan Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro atas pelayanan yang baik dan kenyamanan belajar dalam lingkungan kampus. Semua petugas Perpustakaan Fakultas Ekonomi, terimakasih atas waktu dan bantuannya dalam mencarikan buku-buku yang diperlukan penulis.
6. BPS Propinsi Jawa Tengah yang selama ini telah membantu dalam mencari ketersediaan data.
7. Suamiku, Mas Wasto....terimakasih untuk bantuan, pengertian, kesabaran, motivasi kekuatan dan semua pengorbanan waktu, tenaga, pikiran dan dukungan moril, materil yang telah diberikan.
8. Putriku....Aisyah Aulia R, tambah pintar ya.... engkaulah penghibur saat lelah dan letihnya umi. Doa umi, semoga engkau tumbuh menjadi wanita Sholehah. Semoga selalu sehat, cantik fisik dan hatimu.

9. Ayah dan Ibu tersayang, yang terus mendoakan dan memberikan dukungan dalam banyak hal. Aku rindu semua.. Aku ingin memeluk semua. Ketahuilah bahwa aku akan terus mencintai kalian hingga akhir zaman. Semoga Allah mengumpulkan kita kembali disurgaNya.
10. Keluarga Besar Blora, ibu dan bapak mertua...terimakasih atas dukungan dan penyemangat setia agar cepat selesai kuliahku.
11. Kedua Kakakku, Mbak Nunung dan Mbak Yuyun yang selalu menggerutu, nih sekarang adek kalian dah lulus... terimakasih dukungan dan do'anya.
12. Sahabat baikku yang banyak memberikan motivasi disaat-saat kita kuliah dan dalam mengerjakan skripsi ini : Liana. Terlalu banyak yang telah engkau lakukan untukku. Makasih semuanya ya..
13. Sahabat setia dibimbingan skripsi: Shandy, makasih atas kebersamaan kita, atas diskusi-diskusi kita. Kamu baik banget mengajari banyak hal dan memberikan ilmu-ilmu sehingga skripsiku cepat selesai setelah belajar bersamamu.
14. Teman-teman satu jurusan IESP 2005. Terimakasih atas Ilmu2 dan segalanya.
15. Tidak lupa saya ucapkan terimakasih kepada seluruh pihak-pihak yang telah banyak membantu penulis dan tidak dapat disebutkan satu persatu. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat dan menambah pengetahuan bagi seluruh pembaca. Amin...

Semarang, Desember 2010

Penulis,

Eka Parmawati
NIM. C2B005165

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN KELULUSAN UJIAN	iii
PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI	iv
ABSTRAKSI	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR TABEL	x
DAFTAR GAMBAR	xi
DAFTAR LAMPIRAN	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	7
1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian	9
1.3.1 Tujuan Penelitian	9
1.3.2 Kegunaan Penelitian	10
1.4 Sistematika Penulisan	11
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	13
2.1 Landasan Teori	13
2.1.1 Teori Otonomi Daerah	13
2.1.2 Teori Pengelolaan Pemerintahan Daerah dalam Otonomi Daerah	13
2.1.3 Teori Peranan Pemerintah dalam Perekonomian	14
2.1.4 Teori Pengelolaan Keuangan Pemerintah	16
2.1.5 Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan pemerintah Daerah	17
2.1.6 Kebijakan Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah	19
2.1.7 Teori Perkembangan Pengeluaran Pemerintah	19
2.1.8 Teori Klasik Pembangunan Ekonomi.....	25
2.1.9 Penerimaan Pemerintah Daerah	26
2.1.10 Belanja Daerah	34
2.1.11 Produk Domestik Regional Bruto	35
2.1.12 Uji Kausalitas Granger (<i>Granger Causality Test</i>).....	37
2.1.13 Kausalitas Antara Penerimaan Pemerintah, Belanja dan PDRB	38
2.2 Penelitian Terdahulu	41
2.3 Kerangka Pemikiran	46
2.4 Hipotesis	48

BAB III	METODE PENELITIAN	49
3.1	Variabel Penelitian dan Definisi Operasional Variabel	49
3.2	Populasi dan Sampel	52
3.3	Jenis dan Sumber Data	53
3.3.1	Jenis Data	53
3.3.2	Sumber Data	54
3.4	Metode Pengumpulan Data	54
3.5	Metode Analisis Data	55
3.6	Pengujian Kausalitas	55
3.7	Pengujian Arah Kausalitas	59
3.7.1	Pengujian Arah Kausalitas Penerimaan terhadap Belanja	59
3.7.2	Pengujian Arah Kausalitas Belanja terhadap PDRB	63
3.7.3	Pengujian Arah Kausalitas Penerimaan terhadap PDRB	64
BAB IV	HASIL DAN PEMBAHASAN	67
4.1	Deskripsi Objek Penelitian	68
4.1.1	Gambaran Umum Negara Republik Indonesia	68
4.1.2	Kondisi Perekonomian Kabupaten/Kota	70
4.1.3	Perkembangan Penerimaan Daerah	72
4.1.4	Perkembangan Pengeluaran Belanja Daerah	73
4.1.5	Perkembangan Produk Domestik Regional Bruto	74
4.2	Analisa Data Regresi	75
4.2.3	Interpretasi Hasil dan Pembahasan	77
4.2.3.1	Hasil Pengujian Hubungan Kausalitas Penerimaan, Belanja dan PDRB	77
BAB V	PENUTUP	82
5.1	Kesimpulan	82
5.2	Keterbatasan	83
5.3	Saran	84

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1.1 Realisasi Penerimaan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Seluruh Indonesia Tahun 2006-2008 (000 rupiah)	3
Tabel 1.2 Realisasi Belanja Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota seluruh Indonesia Tahun 2004-2006 (000 Rupiah)	4
Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu	44
Tabel 4.1 Rekapitulasi Jumlah Provinsi, Kabupaten/Kota Seluruh Indonesia Edisi : Januari 2009	69
Tabel 4.2 Simpulan Hasil Pengujian Arah Kausalitas Transfer Antar Pemerintah dengan Beberapa Variabel Penelitian Terpilih	76

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 2.1	Pertumbuhan Pengeluaran Pemerintah Menurut Wagner 22
Gambar 2.2	Pertumbuhan Pengeluaran Pemerintah Menurut Peacock dan Wiseman 24
Gambar 2.3	Kerangka Pemikiran 47

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran A : Data Mentah
- Lampiran B : Uji Kausalitas

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Tingkat pertumbuhan ekonomi yang ingin dicapai dalam upaya pembangunan akan terwujud apabila jumlah fisik barang dan jasa yang dihasilkan dalam suatu perekonomian menjadi bertambah besar pada tahun-tahun berikutnya. Anggaran belanja merupakan salah satu instrumen kebijakan fiskal pemerintah untuk mempengaruhi pertumbuhan perekonomian. Kebijakan fiskal bekerja mempengaruhi perekonomian melalui anggaran yang berfungsi sebagai alokasi, distribusi dan stabilisasi (Musgrave, 1996). Pada dasarnya kebijakan fiskal akan mentransfer tenaga beli masyarakat (berupa pajak, keuntungan, bea, dan pinjaman) kepada pemerintah dan mentransfernya kembali kepada masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung, dan didistribusikan menurut pertimbangan-pertimbangan tertentu (Santoso, 1992).

Dalam lingkup regional, ketiga fungsi anggaran tersebut ditempuh dengan mengalokasikan transfer ke daerah. Fisher (1996), memberikan gambaran bahwa

transfer sudah merupakan fenomena umum yang terjadi di semua negara di dunia terlepas dari sistem pemerintahannya dan bahkan sudah menjadi ciri yang paling menonjol dari hubungan keuangan antara pusat dan daerah.

Seiring dengan pelaksanaan otonomi daerah, pemerintah daerah kabupaten/kota dihadapkan pada tantangan baru, yaitu pemenuhan sendiri kebutuhan pembiayaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Adanya kebijakan otonomi daerah tersebut, pemerintah daerah diberikan kesempatan yang lebih leluasa untuk melakukan berbagai kebijakan publik daerah. Dalam rangka membiayai pengeluaran publik, pemerintah daerah tidak hanya melakukan penggalan Pendapatan Asli Daerah (PAD) tetapi juga memperoleh alokasi dana perimbangan dari pusat. Pengeluaran pemerintah pada umumnya memiliki keterbatasan dalam pembiayaan. Pembiayaan pengeluaran pemerintah yang berasal dari sumber APBN tergantung kebijakan dari pemerintah pusat, sementara pengeluaran pemerintah yang berasal dari APBD sangat tergantung dari besaran dana perimbangan yang berasal dari transfer pemerintah pusat yang berupa, Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Dana Bagi Hasil (DBH), karena Pendapatan Asli Daerah pada umumnya relatif kecil dan belum dapat diandalkan sebagai sumber pembiayaan. Data menunjukkan bahwa laju pertumbuhan belanja pemerintah daerah cenderung lebih cepat dari pada laju pertumbuhan PAD. Proporsi dana PAD hanya mampu membiayai paling tinggi sebesar 20% (Kuncoro, 2007). Sektor swasta juga sangat sulit diharapkan untuk berkontribusi lebih besar dalam menggerakkan perekonomian, sehingga pembangunan daerah mendapat

penerimaan untuk pembangunan perekonomiannya selain hasil pajak dari masyarakat juga memperoleh penerimaan dari pemerintah pusat. Kenyataan ini menunjukkan bahwa transfer berperan sangat strategis dalam mempengaruhi perekonomian daerah. Strategisnya pengaruh transfer tidak lepas dari interaksi antara penerimaan dan alokasi belanjanya.

Tabel 1.1
Realisasi Penerimaan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Seluruh
Indonesia Tahun 2006-2008 (000 rupiah)

No.	Jenis Penerimaan	2006	2007	2008
A.	Pendapatan daerah	208.506.146.183	244.309.131.163	258.486.411.213
1.	Pendapatan Asli Daerah	13.961.949.844	16.444.847.075	16.920.974.869
	a. Pajak Daerah	4.628.027.870	5.380.379.942	5.590.562.804
	b. Retribusi Daerah	4.594.277.558	5.388.033.569	5.793.251.384
	c. Hasil Perusahaan Milik Daerah & Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	717.028.949	1.121.808.607	1.518.96.391
	d. Lain-lain PAD yang Sah	4.022.615.467	4.554.624.957	4.018.264.290
2.	Dana Perimbangan	191.851.484.968	207.738.873.105	222.963.101.455
	a. Bagi Hasil Pajak	22.441.237.520	21.907.687.087	25.628.205.486
	b. Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam	18.708.105.824	19.899.083.515	18.170.688.875
	c. Dana Alokasi Umum	128.898.195.266	148.956.335.359	158.757.677.570
	d. Dana Alokasi Khusus	11.772.601.764	16.975.767.144	20.406.529.524
	e. Bagi Hasil Pajak dan Bantuan Keuangan Provinsi	10.031.344.594	-	-
3.	Lain-lain Pendapatan yang Sah	2.693.311.371	20.125.410.983	18.602.334.889
B.	Pembiayaan Daerah	24.991.045.328	45.988.677.169	37.266.788.248
	Jumlah	233.497.791.511	290.307.808.332	295.753.199.461

Sumber : Badan Pusat Statistik Republik Indonesia (Statistics Indonesia, 2009)

Dari Tabel 1.1 di atas dapat kita lihat perkembangan pendapatan dan biaya daerah dari tahun 2006 sampai tahun 2008, dimana penerimaan daerah dari tahun ke tahun meningkat sebesar 29,31 % di tahun 2006, 34,35% tahun 2007, dan

36,34% di tahun 2008. Akan tetapi, kenaikan tersebut tidak diikuti oleh perkembangan kenaikan pembiayaan daerah. Pembiayaan daerah tahun 2006-2007 naik sebesar 19,4%, yang sebelumnya 23,09% (2006), naik menjadi 42,49%, sedangkan pada tahun 2007-2008 pembiayaan daerah menurun sebesar 8,17%.

Penerimaan daerah yang berasal dari pendapatan daerah dari tahun ketahun semakin meningkat karena diikuti oleh meningkatnya penerimaan daerah dari dana perimbangan, walaupun Pendapatan Asli Daerah peningkatannya tidak setajam dana perimbangan. Penerimaan dari PAD dari tahun 2006-2008 rata-rata di bawah < 10% dari seluruh jumlah pendapatan daerah. Sedangkan dana perimbangan dari transfer pemerintah pusat peningkatannya mencapai lebih dari 90%, khususnya dari Dana Alokasi Umum. Menurut Adi (2006), proporsi DAU terhadap penerimaan daerah masih tertinggi dibanding dengan penerimaan daerah yang lain, termasuk PAD. Hal ini membuktikan peran pemerintah pusat sangat penting bagi pembiayaan pembangunan daerah.

Tabel 1.2

Realisasi Belanja Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota seluruh Indonesia Tahun 2004-2006 (000 Rupiah)

Jenis Belanja		2006	2007	2008
A.	Belanja Tidak Langsung	87.405.357.099	108.548.513.241	133.261.819.036
1.	Belanja Pegawai	71.843.768.814	86.901.788.463	108.944.282.221
2.	Belanja Bunga	121.338.185	208.030.295	219.512.725
3.	Belanja Subsidi	0	410.602.127	464.507.441
4.	Belanja Hibah	1.700.669.389	3.102.522.701	4.712.026.737
5.	Belanja Bantuan Sosial	7.312.926.617	9.925.219.001	8.148.535.025
6.	Belanja Bagi Hasil	1.783.306.568	932.224.462	929.821.262

7.	Belanja Bantuan Keuangan	3.498.991.881	6.125.023.524	8.310.631.338
8.	Pengeluaran Tidak Terduga	1.144.355.645	943.102.668	1.532.502.287
B.	Belanja Langsung	99.652.408.963	133.045.900.061	156.548.024.051
1.	Belanja Pegawai	7.941.074.175	15.994.675.112	19.121.493.592
2.	Belanja Barang dan Jasa	31.301.980.428	42.551.876.837	50.307.479.620
3.	Belanja Modal	60.409.354.360	74.499.348.112	87.119.050.839
	Jumlah	187.057.766.062	241.594.413.302	289.809.843.087

Sumber : Badan Pusat Statistik Indonesia (Statistics Indonesia)

Tabel 1.2 menunjukkan bahwa setiap pos belanja daerah dari tahun 2006 sampai tahun 2008 mengalami peningkatan. Sejak tahun 2006 sampai 2008 total belanja daerah meningkat dari 26,04% di tahun 2006, 33,63% di tahun 2007, dan menjadi 40,34% di tahun 2008. Rata-rata peningkatan tersebut mencapai 7,1%. Tahun 2007 total belanja meningkat 7,1% selain disebabkan adanya peningkatan disetiap pos belanja juga karena adanya dana subsidi yang sebelumnya pada tahun 2006 tidak mendapatkan dana subsidi. Peningkatan belanja tersebut tidak lepas dari adanya peningkatan dana transfer pemerintah pusat sebagai salah satu sumber penerimaan daerah, hal ini memberikan bukti bahwa kenaikan transfer pemerintah pusat mendorong adanya peningkatan belanja, khususnya belanja modal untuk barang-barang publik, hal ini dimungkinkan akan memicu pertumbuhan PDRB daerah.

Dari uraian di atas dijelaskan bahwa transfer dari pemerintah pusat sebagai salah satu komponen penerimaan pemerintah daerah disamping PAD, akan tetapi apakah transfer pemerintah disuatu periode tertentu mampu memberikan stimulus bagi pertumbuhan ekonomi daerah dan pada gilirannya memberikan kontribusi kepada pemerintah daerah untuk tahun berikutnya, atau singkatnya, sampai seberapa besar proporsi transfer dialokasikan untuk membiayai berbagai jenis

pengeluaran dan sampai seberapa besar berbagai jenis pengeluaran dapat berkontribusi kepada PDRB.

Berdasarkan Tabel 1 (lampiran A), bahwa kondisi perekonomian masing-masing kabupaten dan kota pada setiap provinsi terdapat perbedaan. Tiga kabupaten/kota yang memiliki peringkat PDRB tertinggi adalah kabupaten dan kota yang terdapat di Pulau Jawa (Kabupaten Bekasi dan Kabupaten Bogor), kemudian disusul oleh kabupaten dan kota di pulau Sumatera (Kota Medan). Beberapa faktor yang menjadi penyebab terjadinya perbedaan laju pertumbuhan PDRB antar kabupaten/kota antara lain, adanya perbedaan kepadatan dan populasi penduduk, perbedaan jumlah produk sebagai hasil proses produksi barang dan jasa yang dihasilkan tenaga kerja, perbedaan penerimaan dan pengeluaran pemerintah daerah, perbedaan jumlah investasi, dan masih banyak lagi faktor yang mempengaruhinya.

Pulau Jawa dan Sumatera memiliki penerimaan daerah yang besar selain dari hasil daerahnya sendiri, tetapi juga penerimaan dari transfer pemerintah pusat. Hal ini karena dekat dengan pusat kota administrasi pemerintahan sehingga selalu meningkatkan pembangunan daerahnya. Meningkatnya pembangunan daerah memberikan gairah bagi investor untuk berinvestasi serta ketersediaan tenaga kerja yang banyak akibat dari populasi penduduk yang padat, hal inilah yang membuat meningkatnya produktivitas dalam menghasilkan produk barang dan jasa masyarakat. Pertumbuhan perekonomian daerah yang berhubungan dengan kenaikan transfer sebagai salah satu komponen penerimaan pemerintah dianggap sebagai faktor yang positif dan merangsang pertumbuhan ekonomi

artinya, semakin tinggi penerimaan pemerintah akan meningkatkan potensi pasar domestik, dengan catatan mereka mempunyai daya beli, sehingga permintaan akan meningkat (Todaro, 1997:63). Menurut Jhingan (1998), sesuai dengan Teori Pertumbuhan Harrod-Domar, bahwa investasi memiliki peran kunci dalam pertumbuhan ekonomi yaitu menciptakan pendapatan dan memperbesar kapasitas produksi perekonomian dengan cara meningkatkan stok modal. Naiknya stok modal daerah akan meningkatkan produksi, hal ini menuntut produktivitas dari masing-masing komponen pengeluaran pemerintah daerah untuk dapat memberikan kontribusi kepada PDRB.

Implikasi bagi pemerintah adalah mengetahui ada tidaknya hubungan antara penerimaan, belanja dan PDRB pada kota dan kabupaten di Indonesia. Sifat dari hubungan tersebut diperlukan bagi pemerintah daerah dalam langkah-langkah meningkatkan peranannya untuk meningkatkan produk masyarakat yang berkualitas, yang selanjutnya akan mendorong kemajuan pembangunan daerahnya. Hal ini menuntut produktivitas masing-masing komponen pengeluaran pemerintah untuk dapat memberikan kontribusi kepada PDRB untuk periode berikutnya secara berkesinambungan. Tentunya pengeluaran-pengeluaran komponen tersebut harus dialokasikan kepada pengeluaran-pengeluaran yang bersifat produktif dan investasi.

Berdasarkan kondisi tersebut, penulis tertarik mengadakan penelitian mengenai permasalahan ini, dan menyajikannya ke dalam bentuk penelitian dengan judul Kausalitas Penerimaan, Belanja dan PDRB Kabupaten/Kota di Indonesia (Studi Kasus Periode 2001-2008).

1.2 Rumusan Masalah

Otonomi daerah berjalan di tiap kabupaten dan kota di Indonesia hingga saat ini. Realitas yang terjadi bahwa pemerintah daerah belum dapat sepenuhnya lepas dari pemerintah pusat di dalam mengatur rumah tangga daerah. Data telah menunjukkan sumber penerimaan daerah sebagian besar berasal dari transfer pemerintah dalam bentuk dana perimbangan untuk mendanai belanja daerah. Hal ini dapat dikatakan bahwa transfer pemerintah pusat mempunyai peranan strategis dalam pembangunan daerah, karena pendapatan daerah (PAD) relatif kecil sehingga tidak dapat diandalkan dalam mempercepat pembangunan perekonomian daerah. Akan tetapi, permasalahan yang terjadi saat ini adalah pemerintah daerah terlalu menggantungkan alokasi transfer untuk membiayai belanja modal dan pembangunan tanpa mengoptimalkan potensi yang dimiliki daerah. Pada saat alokasi transfer pemerintah yang diperoleh besar, maka pemerintah daerah akan berusaha agar pada periode berikutnya transfer yang akan diperoleh tetap. Menurut Adi (2006), proporsi DAU terhadap penerimaan daerah masih yang tertinggi dibanding dengan penerimaan daerah yang lain, termasuk PAD. Kuncoro (2007) juga menyebutkan bahwa PAD hanya mampu membiayai belanja pemerintah daerah paling tinggi sebesar 20%. Kenyataan ini tidak sejalan dengan tujuan otonomi daerah yaitu memandirikan daerah dengan potensi-potensi yang dimilikinya.

Permasalahan dalam penelitian ini adalah, dilihat dari sisi penerimaan pemerintah daerah kabupaten/kota di Indonesia mendapat dana penerimaan daerah tertinggi dari dana perimbangan pemerintah pusat. Dilihat dari sisi belanjanya, pemerintah daerah kabupaten kota di Indonesia sebagian besar masih didanai dari dana perimbangan tersebut. Padahal dari sisi ouputnya (PDRB) selama ini masih rendah. Dari permasalahan tersebut, peneliti ingin mengetahui hubungan kausalitas antara penerimaan, belanja dan PDRB. Untuk itu diajukan pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana hubungan kausalitas antara penerimaan daerah dengan belanja daerah pada kabupaten/kota di Indonesia ?
2. Bagaimana hubungan kausalitas antara belanja daerah dengan PDRB pada kabupaten/kota di Indonesia ?
3. Bagaimana hubungan kausalitas antara penerimaan daerah dengan PDRB pada kabupaten/kota di Indonesia ?

1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

Seperti yang telah diuraikan sebelumnya, maka penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan bukti empiris mengenai hubungan kausalitas penerimaan pemerintah daerah yang berasal dari transfer pemerintah dan PAD terhadap

belanja daerah dan PDRB kabupaten/kota di Indonesia. Secara umum penelitian ini bertujuan untuk:

1. Menganalisis bagaimana hubungan kausalitas antara penerimaan daerah dengan belanja daerah pada kabupaten/kota di Indonesia ?
2. Menganalisis bagaimana hubungan kausalitas antara belanja daerah dengan PDRB pada kabupaten/kota di Indonesia ?
3. Menganalisis bagaimana hubungan kausalitas antara penerimaan daerah dengan PDRB pada kabupaten/kota di Indonesia ?

1.3.2 Kegunaan Penelitian

Hasil penulisan penelitian ini diharapkan menghasilkan sesuatu yang bermanfaat bagi penulis itu sendiri, bagi masyarakat maupun pihak-pihak terkait.

Adapun kegunaan dari penulisan penelitian ini antara lain:

1. Bagi penulis

Aspek teoritis hasil kajian ini diharapkan dapat memperluas pengetahuan dan memberikan sumbangan empiris terhadap kepustakaan tentang “ Kausalitas Antara Penerimaan, Belanja dan PDRB Kabupaten/Kota di Indonesia”.

2. Bagi Mahasiswa

Diharapkan akan menambah pengetahuan tentang teori maupun praktik-praktik ilmu ekonomi pada pemerintahan di Indonesia, sebagai sumber referensi untuk penelitian terkait dan juga merupakan kesempatan baik bagi mahasiswa dalam menerapkan dan mengaplikasikan teori yang diperoleh selama kuliah.

3. Bagi Pemerintah

Memberi masukan bagi pemerintah, khususnya sejauh mana pemerintah daerah pada masa otonomi mengelola anggaran belanja daerahnya masing-masing dan membuka wawasan baru mengenai pengaruh penerimaan pemerintah daerah terhadap belanja daerah dan PDRB kabupaten/kota di Indonesia.

4. Bagi pendidikan Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan

Dapat menambah topik kepustakaan, khususnya dibidang Ekonomi Publik, Otonomi Daerah dan Desentralisasi Fiskal.

1.4 Sistematika Penulisan

Untuk memberikan gambaran tentang permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini, dibuatlah sistematika penulisan sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan. Terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab II Telaah Pustaka. Pada bab ini berisi penjelasan dan pembahasan secara rinci tentang landasan teori meliputi penerimaan pemerintah daerah, belanja daerah, Produk Domestik Regional Bruto, dan kerangka penelitian yang tercantum dalam proposal penelitian. Selain itu pada bab ini juga terdapat hasil penelitian terdahulu serta perumusan hipotesa.

Bab III Metode Penelitian. Bab ini berisi uraian secara umum mengenai variabel penelitian dan definisi operasional variabel, populasi dan sampel, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data, metode analisis.

Bab IV Hasil dan Analisis. Berisi tentang uraian secara rinci mengenai deskripsi penelitian, langkah-langkah analisis data dan interpretasi hasil yang diperoleh. Interpretasi yang diperoleh berupa analisa kualitatif dengan menggunakan rumus yang sesuai dengan pokok masalah.

Bab V Kesimpulan dan Saran. Bab ini memuat secara singkat tentang kesimpulan penelitian, keterbatasan penelitian dan saran-saran yang ditujukan untuk berbagai pihak.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Teori Otonomi Daerah

Kata otonomi berasal dari Yunani yang artinya, *autos* dan *nomos*, yaitu *autos* artinya sendiri dan *nomos* artinya memerintah. Dalam UU No 32 Tahun 2004 yang dimaksud otonomi daerah adalah hak wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Sedangkan daerah otonom adalah masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

2.1.2 Teori Pengelolaan Pemerintahan Daerah dalam Otonomi Daerah

Penerapan otonomi daerah oleh pemerintah pusat di Indonesia memiliki tujuan untuk kemandirian pemerintah daerah dalam mengelola rumah tangganya. Dalam penerapannya pemerintah pusat tidak lepas tangan secara penuh dan masih memberikan bantuan kepada pemerintah daerah berupa dana perimbangan yang dapat digunakan untuk pembangunan dan menjadi komponen penerimaan daerah

dalam APBD. Menurut Sidik (2000), transfer pemerintah pusat diharapkan menjadi faktor pendorong bagi pemerintah daerah untuk meningkatkan upaya pengumpulan penerimaan daerahnya.

Pemerintah daerah harus dapat menjalankan rumah tangganya secara mandiri dengan mengupayakan peningkatan pelayanan publiknya. Belanja daerah yang dilakukan pemerintah dalam meningkatkan pelayanan publik digunakan untuk pembangunan, perbaikan sektor pendidikan, kesehatan, transportasi dan sebagainya, sehingga masyarakat juga menikmati manfaat dari pembangunan daerah. Tersedianya infrastruktur yang baik diharapkan dapat menciptakan efisiensi dan efektivitas diberbagai sektor. Produktivitas masyarakat diharapkan semakin tinggi dan pada gilirannya terjadi peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah.

Pembangunan dalam sektor pelayanan publik akan merangsang masyarakat untuk lebih aktif dalam meningkatkan produktivitasnya dan bergairah dalam bekerja karena ditunjang oleh fasilitas yang memadai, selain itu investor juga akan tertarik berinvestasi karena fasilitas yang tersedia di daerah. Semakin meningkat produk daerah maka pendapatan masyarakat akan semakin tinggi dari hasil penjualan produk daerah, sehingga pemerintah dapat menyerap kembali dalam bentuk pajak daerah. Hal ini akan meningkatkan pendapatan PAD.

2.1.3 Teori Peranan Pemerintah dalam Perekonomian

Dalam lingkup regional, pemerintah mempunyai peranan dan fungsi yang strategis dalam mempengaruhi perekonomian. Dalam pandangan Klasik Adam

Smith, pemerintah mempunyai tiga fungsi, yaitu: fungsi pemerintah memelihara ketahanan dan keamanan, fungsi pemerintah untuk menyelenggarakan keadilan serta fungsi pemerintah untuk menyediakan baran-barang umum (Suparmoko, 1999).

Menurut Musgrave (Kuncoro,2007), dalam pandangan teori ekonomi publik, kebijakan pemerintah berperan dalam mempengaruhi perekonomian melalui anggaran berfungsi sebagai alokasi, distribusi dan stabilisasi. Menurut Sutriyono (2006), fungsi tersebut dijelaskan sebagai berikut;

- a. Fungsi alokasi, yaitu pemerintah berperan dalam mengalokasikan sumber-sumber perekonomian kepada seluruh masyarakat secara efisien.
- b. Fungsi distribusi, yaitu pemerintah berperan dalam pemeratakan kesejahteraan masyarakat secara proporsional untuk mencapai pertumbuhan ekonomi masyarakat yang optimal.
- c. Fungsi stabilisasi, yaitu pemerintah berperan dalam menjaga dan menjamin perekonomian secara makro.

Dalam mencapai sistem pemerintahan yang efektif dan efisien ketiga fungsi anggaran tersebut ditempuh dengan mengalokasikan transfer ke daerah. Fisher (1996), memberikan gambaran bahwa transfer sudah merupakan fenomena umum yang terjadi disemua negara di dunia terlepas dari sistem pemerintahannya dan bahkan sudah menjadi ciri yang paling menonjol dalam hubungan keuangan antara pusat dan daerah.

2.1.4 Teori Pengelolaan Keuangan Pemerintah

Dalam analisis Keuangan Negara, model-model tradisional menyatakan bahwa baik pengeluaran maupun penerimaan pemerintah ditentukan secara simultan sebagai “*kemurahan hati pemerintah*” (*benevolent government*) dalam upaya pemerintah untuk memaksimalkan fungsi kesejahteraan masyarakatnya (*social welfare fuction*) (Cullis dan Jones, 1994). Aliran teori yang berbeda-beda mengenai interdependensi antara kedua variabel tersebut berawal dari debat antara hipotesis pajak dan pengeluaran (*tax and spend*) dengan pengeluaran dan pajak (*spend and tax*).

Kausalitas dari pengeluaran menuju penerimaan (*spend and tax*) berarti bahwa pengeluaran berubah sebelum terjadi perubahan penerimaan. Hal ini terjadi ketika kenaikan pengeluaran tersebut diciptakan oleh kejadian-kejadian khusus yang menyebabkan pemerintah menaikkan pajak agar masyarakat tetap memperoleh pelayanan publik. Hipotesis ini ditunjukkan pertama kali oleh Peacock dan Wiseman (1979), mereka berargumen bahwa kenaikan pengeluaran pemerintah (sebagai akibat dari suatu gejolak) akan berlanjut (*persistent*) walaupun gejolak itu telah selesai. Implikasi dari arah kausalitas ini adalah bahwa sistem pengelolaan keuangan daerah adalah desentralisasi.

Kausalitas dari penerimaan menuju pengeluaran (*tax and spend*), mengindikasikan bahwa penerimaan berubah sebelum terjadi perubahan

pengeluaran ini terjadi ketika tingkat pengeluaran disesuaikan dengan perubahan penerimaan, karena kenaikan pajak mengarah pada kenaikan pengeluaran sehingga pengeluaran dapat naik atau turun terhadap level berapa pun yang dapat disokong oleh penerimaan (Friedman,1978). Implikasi dari arah kausalitas ini adalah bahwa sistem pengelolaan keuangan daerah dengan sentralisasi.

Kausalitas secara timbal balik (*bidirection*) terjadi ketika pengeluaran berubah bersamaan dengan perubahan penerimaan. Ini berarti pemerintah melakukan sinkronisasi fiskal. Hipotesis sinkronisasi fiskal ini valid ketika keputusan perubahan sisi penerimaan dan pengeluaran disesuaikan dengan tuntutan masyarakat. Proposisi ini pertama kali diajukan oleh Musgrave (1996). Implikasi dari arah kausalitas ini adalah bahwa sistem pengelolaan keuangan daerah diputuskan secara bersama-sama antara kontrol dari pusat dan tuntutan daerah.

2.1.5 Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan pemerintah Daerah

Pada sistem pembiayaan pemerintahan dalam kerangka NKRI terdapat pembagian keuangan antara pemerintah pusat dan daerah serta pemerataan antar daerah secara adil dan proporsional, demokratis dan transparan, dengan tetap memperhatikan potensi, kondisi dan kebutuhan daerah sejalan dengan kewajiban dan pembagian kewenangan serta tata cara penyelenggaraan kewenangan tersebut termasuk pengelolaan dan penguasaan keuangannya. Di dalam UU No. 33 Tahun

2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah diatur tentang sumber-sumber penerimaan daerah yang terdiri dari:

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD), yang terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil BUMD dan pengelolaan kekayaan daerah lainnya yang dipisahkan serta lain-lain pendapatan daerah yang sah.
2. Dana Perimbangan yang terdiri dari Dana Bagi Hasil SDA dan Bukan SDA, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus.
3. Penerimaan pembiayaan, yang terdiri atas sisa lebih perhitungan dana anggaran dan pinjaman daerah.
4. Lain-lain penerimaan yang sah.

Tujuan dari pelaksanaan perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dengan daerah adalah untuk mengatasi masalah kesenjangan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah (*vertical imbalance*) serta kesenjangan antar daerah (*horisontal imbalance*). Implikasinya akan banyak memberi manfaat bagi daerah, diantaranya (Haryanto, 2006):

1. Meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan masyarakat
2. Mendorong perkembangan perekonomian daerah
3. Mendorong peningkatan pembangunan daerah di segala bidang
4. Meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat
5. Meningkatkan pendapatan asli daerah

6. Mendorong kegiatan investasi

2.1.6 Kebijakan Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah

Sesuai dengan UU No. 33 Tahun 2004 bahwa Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi fiskal mengandung pengertian bahwa kepada daerah diberikan kewenangan untuk memanfaatkan sumber keuangan sendiri dan didukung dengan perimbangan keuangan antara pusat dan daerah.

Kebijakan perimbangan keuangan dilakukan dengan mengikuti pembagian kewenangan (*money follows function*). Hal ini berarti bahwa hubungan keuangan antara pusat dan daerah perlu diberikan pengaturan sedemikian rupa, sehingga kebutuhan belanja akan menjadi tanggung jawab daerah dapat dibiayai dari sumber-sumber penerimaan yang ada.

Selanjutnya dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, dan pelayanan kepada masyarakat berdasarkan asas desentralisasi, kepada daerah diberikan kewenangan untuk memungut pajak/retribusi (*tax assignment*) dan memberikan bagi hasil penerimaan (*revenue sharing*) serta bantuan keuangan (*grant*) atau dikenal dengan Dana Perimbangan.

2.1.7 Teori Perkembangan Pengeluaran Pemerintah

Menurut Alfirman dan Sutriyono (2006), terdapat beberapa teori yang menjelaskan tentang perkembangan pengeluaran pemerintah, sebagai berikut:

1. Model Pembangunan Perkembangan Pengeluaran Pemerintah

Model ini dikembangkan oleh Rostow dan Musgrave yang menghubungkan perkembangan pengeluaran pemerintah dengan tahap-tahap pembangunan ekonomi yaitu tahap awal, tahap menengah dan tahap lanjut.

a. Tahap Awal

Pada tahap awal perkembangan ekonomi, persentase investasi pemerintah terhadap total investasi besar, sebab pada tahap ini pemerintah harus menyediakan prasarana seperti pendidikan, kesehatan, prasarana transportasi.

b. Tahap Menengah

Pada tahap menengah pembangunan ekonomi, investasi pemerintah tetap diperlukan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi agar dapat tinggal landas, namun pada tahap ini peranan investasi swasta sudah semakin besar. Peranan pemerintah tetap besar pada tahap menengah, oleh karena peranan swasta semakin besar akan menimbulkan banyak kegagalan pasar dan juga menyebabkan pemerintah harus menyediakan barang dan jasa publik dalam jumlah yang lebih banyak. Selain itu, pada tahap ini perkembangan ekonomi menyebabkan terjadinya hubungan antarsektor

yang semakin kompleks. Misalnya, pertumbuhan ekonomi yang ditimbulkan oleh perkembangan sektor industri akan menimbulkan semakin tingginya pencemaran atau polusi. Pemerintah harus turuntangan mengatur dan mengurangi dampak negatif dari polusi. Pemerintah juga harus melindungi buruh dan meningkatkan kesejahteraannya.

Musgrave (1980) berpendapat bahwa dalam suatu proses pembangunan, investasi swasta dalam prosentase terhadap PDB semakin besar dan prosentase investasi pemerintah terhadap PDB akan semakin kecil.

c. Tahap Lanjut

Pada tingkat ekonomi lebih lanjut, Rostow mengatakan bahwa aktivitas pemerintah dalam pembangunan ekonomi beralih dari penyediaan prasarana ke pengeluaran-pengeluaran untuk aktivitas sosial seperti program kesejahteraan hari tua dan pelayanan kesehatan masyarakat.

2. Hukum Wagner

Wagner mengemukakan suatu teori mengenai perkembangan pengeluaran pemerintah yang semakin besar dalam prosentase terhadap PDB. Dalam suatu perekonomian apabila pendapatan perkapita meningkat, maka secara relatif pengeluaran pemerintah akan meningkat. Hukum ini dikenal dengan “ *The Law Expanding State Expenditure*”. Dasar dari hukum tersebut adalah pengamatan empiris dari negara-negara maju (Amerika, Jerman, Jepang). Dalam hal ini Wagner menerangkan mengapa peranan pemerintah menjadi semakin besar,

terutama disebabkan karena pemerintah harus mengatur hubungan yang timbul dalam masyarakat, hukum, rekreasi, kebudayaan dan sebagainya (Guritno, 1993).

Kelemahan hukum Wagner adalah karena hukum tersebut tidak didasarkan pada suatu teori mengenai suatu pemilihan barang-barang publik. Wagner mendasarkan pada suatu teori yang disebut teori organis mengenai pemerintah (*organic theory of the state*) yang menganggap pemerintah sebagai individu yang bebas bertindak, terlepas dari anggota masyarakat lainnya. Hukum Wagner diformulasikan sebagai berikut:

$$\frac{PkPP\ 1}{PPK\ 1} < \frac{PkPP\ 2}{PPK\ 2} < \dots < \frac{PkPP\ n}{PPK\ n}$$

Keterangan:

PkPP = pengeluaran pemerintah perkapita

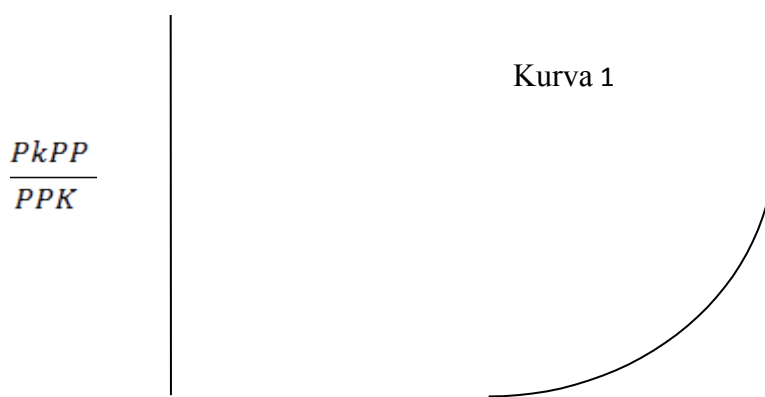
PPK = pendapatan perkapita

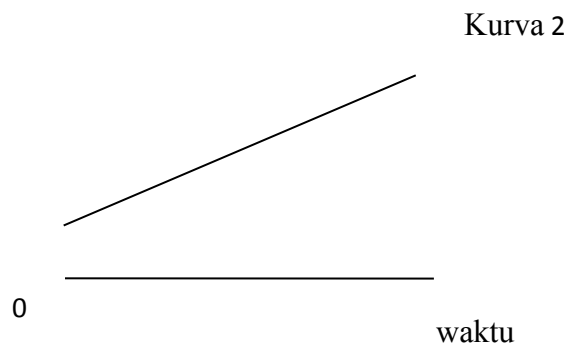
1,2,...,n = jangka waktu (tahun)

Hukum Wagner ditunjukkan dalam Gambar 1.1, dimana kenaikan pengeluaran pemerintah mempunyai bentuk eksponensial yang ditunjukkan oleh kurva 1.

Gambar 2.1

Pertumbuhan Pengeluaran Pemerintah Menurut Wagner





Sumber; Guritno, (1993, hal 172)

3. Teori Peacock dan Wiseman

Peacock dan Wiseman adalah dua orang yang mengemukakan teori mengenai perkembangan pengeluaran pemerintah yang terbaik. Teori mereka didasarkan pada suatu pandangan bahwa pemerintah senantiasa berusaha untuk memperbesar pengeluaran, sedangkan masyarakat tidak suka membayar pajak yang semakin besar untuk membiayai pengeluaran pemerintah yang semakin besar tersebut.

Teori Peacock dan Wiseman merupakan dasar teori pemungutan suara. Peacock dan Wiseman mendasarkan pada suatu teori bahwa masyarakat mempunyai suatu tingkat toleransi pajak, yaitu suatu tingkat dimana masyarakat dapat memahami besarnya pungutan pajak yang dibutuhkan oleh pemerintah untuk membiayai aktivitas pemerintah sehingga mereka mempunyai tingkat kesediaan untuk membayar pajak. Tingkat toleransi ini merupakan kendala bagi pemerintah untuk menaikkan pemungutan pajak secara semena-mena.

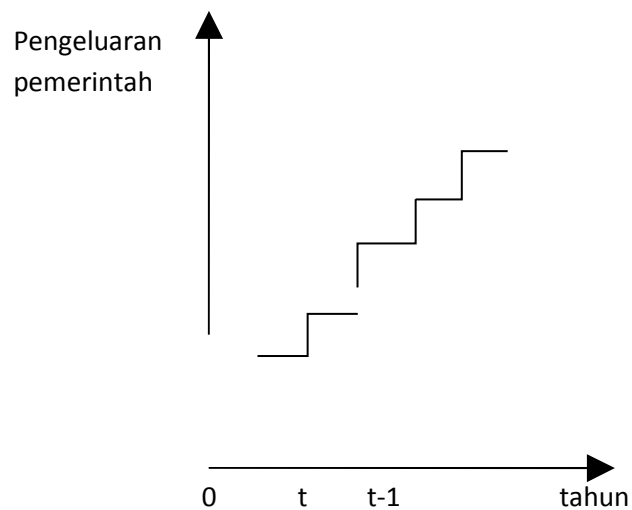
Teori Peacock dan Wiseman adalah sebagai berikut, Pertumbuhan Ekonomi (PDB) menyebabkan pemungutan pajak semakin meningkat walaupun tarif pajak tidak berubah, dan meningkatnya penerimaan pajak menyebabkan pengeluaran pemerintah juga semakin meningkat. Oleh karena itu, dalam keadaan normal, meningkatnya PDB menyebabkan penerimaan pemerintah semakin besar, begitu juga dengan pengeluaran pemerintah yang semakin besar. Apabila keadaan normal tersebut terganggu, misalnya karena adanya perang, maka pemerintah harus memperbesar pengeluarannya untuk membiayai perang. Karena itu penerimaan pemerintah dari pajak juga meningkat dan pemerintah menaikkan penerimaannya tersebut dengan cara menaikkan tarif pajak, sehingga dana swasta untuk investasi dan konsumsi menjadi berkurang. Keadaan ini disebut efek pengalihan (*displacement effect*) yaitu adanya gangguan sosial menyebabkan aktivitas swasta dialihkan pada aktivitas pemerintah.

Perang tidak hanya dibiayai oleh pajak, akan tetapi pemerintah melakukan pinjaman ke negara lain. Akibatnya setelah perang sebetulnya pemerintah dapat kembali menurunkan tarif pajak, namun tidak dilakukan karena pemerintah masih mempunyai kewajiban untuk mengembalikan pinjaman tersebut. Ini yang disebut efek inspeksi (*inspection effect*). Adanya gangguan sosial juga akan menyebabkan terjadinya konsentrasi dimana yang semula dilaksanakan untuk swasta menjadi pemerintah yang menangani, ini disebut efek konsentrasi (*concentration effect*). Adanya ketiga efek tersebut menyebabkan aktivitas pemerintah bertambah. Setelah perang selesai dan keadaan kembali normal maka tingkat pajak akan turun

kembali. Perkembangan pengeluaran versi Peacock dan Wiseman berbentuk seperti tangga.

Gambar 2.2

Pertumbuhan Pengeluaran Pemerintah Menurut Peacock dan Wiseman



Sumber: Dumairy, 1997

2.1.8 Teori Klasik Pembangunan Ekonomi

1. Pertumbuhan Rostow

Walt W. Rostow dalam pertumbuhan ekonomi suatu negara, menjelaskan bahwa perubahan dari keterbelakangan menuju kemajuan ekonomi dapat dijelaskan dalam suatu seri tahapan, yaitu tahap tinggal landas dan tahap menuju tinggal landas.

Tahap pertama, atau tahap tinggal landas adalah suatu tahapan yang dimiliki oleh negara-negara maju yang mempunyai pertumbuhan ekonomi berkesinambungan dan berlangsung secara otomatis. Tahap kedua, atau tahap menuju tinggal landas adalah tahapan masyarakat tradisional pada negara sedang berkembang yang sedang menuju proses tinggal landas dengan pengerahan tabungan untuk bekal investasi agar mempercepat pertumbuhan ekonomi. Kedua tahap ini dijelaskan dengan Model Pertumbuhan Harrod-Domar.

2. Pertumbuhan Harrod-Domar

Setiap perekonomian pada dasarnya harus senantiasa mencadangkan sebagian tertentu dari pendapatan nasionalnya untuk menambah barang-barang modal. Secara jelas dinyatakan bahwa tingkat pertumbuhan GNP ditentukan bersama-sama oleh rasio tingkat tabungan nasional dan rasio modal output nasional. Secara lebih spesifik persamaannya sebagai berikut:

$$\frac{\Delta Y}{Y} = \frac{s}{k}$$

Dimana, $\Delta Y/Y$ adalah pertumbuhan GNP, s adalah tabungan nasional dan k adalah modal output nasional.

Dari persamaan di atas menyatakan bahwa tanpa adanya intervensi pemerintah tingkat pertumbuhan pendapatan nasional akan secara positif berbanding lurus dengan rasio tabungan, yakni semakin banyak bagian GNP yang diinvestasikan maka akan lebih besar lagi GNP yang dihasilkannya. Secara negatif, atau berbanding terbalik terhadap rasio modal output, yakni semakin besar rasio modal output nasional, maka tingkat pertumbuhan GNP semakin rendah.

2.1.9 Penerimaan Pemerintah Daerah

Penerimaan daerah adalah jumlah dari seluruh volume pendapatan daerah yang terdiri atas:

1. Pendapatan Asli Daerah

PAD merupakan pendapatan pendapatan yang menjadi hak untuk dinikmati oleh daerah otonom dari hasil pengelolaan sumber daya yang dimilikinya. Besarnya PAD yang diperoleh mencerminkan daerah tersebut memiliki tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi.

Seperti yang diatur dalam UU No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan antara Pusat dan Daerah. PAD bertujuan untuk memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mendanai pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan potensi daerah sebagai perwujudan desentralisasi yang bersumber dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain PAD yang sah.

a. Pajak Daerah

Pajak daerah merupakan salah satu komponen pendapatan asli daerah yang diperoleh dari orang pribadi atau badan. Mardiasmo (2004) menyatakan, pajak daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-

undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah.

Dalam struktur APBD baru dengan pendekatan kinerja, jenis pendapatan yang berasal dari pajak daerah dan retribusi daerah berdasarkan UU No. 34 tahun 2000 tentang perubahan atas UU No. 18 tahun 1997 tentang pajak dan retribusi daerah, dirinci menjadi:

1. Pajak provinsi, terdiri atas:
 - a. Pajak Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air
 - b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) dan Kendaraan di Atas Air
 - c. Bahan Bakar Kendaraan Bermotor
 - d. Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukiman
2. Pajak Kabupaten/Kota terdiri atas:
 - a. Pajak Hotel
 - b. Pajak Restoran
 - c. Pajak Hiburan
 - d. Pajak Reklame
 - e. Pajak Penerangan Jalan

f. Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C

g. Pajak Parkir

b. Retribusi

Retribusi daerah yang selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian ijin tertentu yang khusus disediakan dan diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

c. Hasil Pengelolaan Daerah yang Dipisahkan

Setiap daerah mempunyai hak untuk memajukan daerahnya dengan menggunakan pendapatan yang bersumber dari pendapatan perusahaan daerah maupun kekayaan setiap daerah yang dimiliki. Undang-undang mengizinkan daerah untuk mendirikan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang nantinya diharapkan dapat memberikan hasil yang dapat memberikan kontribusi pembangunan. Kontribusi tersebut dapat berupa deviden yang dibayarkan kepada daerah atau juga dengan memanfaatkan kekayaan daerah seperti penyewaan tanah dan bangunan daerah yang dapat mendatangkan tambahan bagi penerimaan daerah. Jenis pendapatan yang tergolong dari hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, antara lain bagian laba, deviden dan penjualan saham milik daerah dan lain-lain.

d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

Penerimaan lain-lain PAD yang sah adalah hasil penjualan barang milik daerah, penjualan barang-barang bekas, cicilan kendaraan bermotor, cicilan rumah dinas, penerimaan atas kekayaan daerah, sumbangan pihak ketiga, penerimaan jasa giro (kas daerah) dan lain-lain.

2. Transfer Pemerintah Pusat

Dalam melaksanakan kewenangan daerah, pemerintah pusat memberikan bantuan kepada daerah dalam bentuk transfer. Hampir semua negara memberikan semacam bentuk transfer antar pemerintah, dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah. Pada kenyataannya dibanyak negara berkembang, transfer merupakan pendapatan utama bagi pemerintah daerah. Secara umum, transfer antar pemerintah diambil sebagai alasan dalam mengefesiensikan dan menyetarakan kapasitas fiskal pemerintah daerah. Menurut Adi (2008), mengartikan transfer pemerintah pusat sebagai pengalihan dari pendapatan fiskal antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, yang memainkan peranan penting dalam menentukan tingkat disparitas sosial sehingga dalam jangka panjang dapat mengembangkan perekonomian negara. Dalam hal ini transfer pemerintah pusat terdiri atas :

a. Dana Bagi Hasil

Menurut UU No. 33 Tahun 2004 Dana Bagi Hasil adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Dana Bagi Hasil merupakan hak daerah atas pengelolaan atas sumber-sumber penerimaan negara yang dihasilkan dari masing-

masing daerah, yang besarnya ditentukan oleh daerah penghasil yang didasarkan atas ketentuan perundangan yang berlaku.

Dana Bagi Hasil bersumber dari pajak dan sumber daya alam. Dana Bagi Hasil yang bersumber dari pajak terdiri atas: Pajak Bumi dan Bangunan, Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan, Pajak Penghasilan (PPh pasal 25, pasal 29 wajib pajak orang pribadi dalam negeri dan PPh pasal 21), dan cukai. Sedangkan Dana Bagi Hasil yang bersumber dari sumber daya alam terdiri dari: kehutanan, pertambangan umum, perikanan, pertambangan minyak bumi, gas bumi dan panas bumi.

b. Dana Alokasi Umum

Dana Alokasi Umum merupakan dana hibah murni (*grants*) yang kewenangan penggunaannya diserahkan penuh kepada pemerintah daerah penerima (Adi,2008).

UU No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah memberikan pengertian bahwa Dana Alokasi Umum (DAU) adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan untuk pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.

c. Dana Alokasi Khusus

Menurut UU No. 33 Tahun 2004, Dana Alokasi Khusus adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional.

Dana Alokasi Khusus didasarkan atas usulan kegiatan dan sumber-sumber kekayaan daerah yang diajukan kepada menteri teknis oleh daerah tersebut. Usulan kegiatan tersebut dapat berbentuk rencana suatu proyek atau kegiatan tertentu, atau dapat berupa dokumen program rencana pengeluaran tahunan dan multi tahunan untuk sektor-sektor serta sumber-sumber pembiayaannya.

Dalam menjalankan tugasnya sebagai daerah otonom, pemerintah daerah sangat bergantung pada dana perimbangan. Dana Alokasi Umum yang merupakan penyangga utama pembiayaan APBD sebagian besar terserap untuk belanja pegawai, sehingga belanja untuk proyek-proyek pembangunan menjadi sangat berkurang.

Transfer pemerintah dalam istilah lain di dalam APBN dan APBD adalah sumbangan dan bantuan. Sumbangan adalah pendapatan daerah dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah provinsi serta sumbangan lain yang diatur dengan undang-undang. Sedangkan bantuan adalah jenis bantuan atas instruksi presiden (INPRES) yang digunakan bagi pemerintah daerah kabupaten/kota baik dari pemerintah pusat atau provinsi. Secara umum bantuan dari pemerintah pusat ke daerah dibedakan dalam :

1. Bantuan Umum, adalah bantuan kepada pemerintah daerah yang tidak disertai dengan ikatan atau syarat-syarat tertentu dalam arti daerah menggunakan atau mengalokasikan sesuai kemauan atau kehendak daerah yang bersangkutan.

2. Bantuan Khusus, adalah bantuan yang diberikan kepada daerah untuk menyediakan pelayanan atau jasa-jasa publik yang ditentukan oleh pemerintah pusat.

Sebelum tahun 2001, besaran transfer pemerintah pusat diwujudkan dalam tiga bentuk, yaitu Subsidi Daerah Otonom, Bantuan Inpres, dan Daftar Isian Proyek. Sedangkan saat ini, pada era otonomi daerah ketiga bentuk transfer ini dihilangkan. Sebagai gantinya pemerintah memberikan transfer kepada pemerintah daerah dalam bentuk dana perimbangan (DBH, DAU dan DAK). Secara umum DBH (Dana Bagi Hasil) dan DAU (Dana Alokasi Umum) digolongkan kedalam bentuk *unconditional transfer* atau biasa disebut transfer tak bersyarat. Sedangkan DAK (Dana Alokasi Khusus) digolongkan ke dalam bentuk *conditional transfer* atau biasa disebut dengan transfer bersyarat (Adi, 2008).

Menurut Junanto (2002), definisi transfer bersyarat dan tidak bersyarat adalah:

1. Bersyarat

Bantuan bersyarat diperlukan jika pemerintah penerima menggunakan bantuan untuk tujuan-tujuan tertentu. Bantuan dapat sesuai ataupun tidak sesuai. Suatu bantuan yang sesuai dimana pemerintah penerima membagi biaya pada program-program yang akan dijalankan.

2. Tidak Bersyarat

Dibeberapa negara, dana transfer pemerintah pusat ke daerah melalui sistem yang dapat dijelaskan sebagai “pembagian pajak” atau

“pembagian pendapatan”. Pembagian pajak adalah suatu distribusi pendapatan dari pajak pemerintah pusat kepada pemerintah daerah yang didasarkan pada daerah asal pengumpulan pajak secara nasional melalui negosiasi dengan pemerintah daerah.

3. Penerimaan Pembiayaan

Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah diatur tentang sumber-sumber penerimaan daerah yaitu pinjaman daerah, obligasi daerah dan pinjaman luar negeri yang merupakan bagian dari penerimaan Pembiayaan daerah.

Pinjaman daerah adalah semua transaksi yang mengakibatkan daerah menerima sejumlah uang atau menerima manfaat yang bernilai uang dari pihak lain sehingga daerah tersebut dibebani kewajiban untuk membayar kembali. Sedangkan obligasi daerah merupakan salah satu sumber pinjaman daerah jangka menengah atau jangka panjang yang bersumber dari masyarakat.

Dalam hubungannya dengan otonomi daerah dengan upaya memperkuat PAD maka bantuan dari pemerintah pusat sesungguhnya merupakan suatu instrumen yang diharapkan dapat mendorong peningkatan PDRB, untuk itu daerah perlu memiliki keleluasan menggunakan dana-dana bantuan yang ada sehingga memiliki dampak positif terhadap peningkatan produktivitas masyarakat yang pada akhirnya akan meningkatkan PAD. Bantuan (subsidi) dalam bentuk bantuan umum lebih memberi keleluasaan di dalam menggunakannya sesuai dengan prioritas daerah yang bersangkutan. Sedangkan bantuan dalam bentuk khusus merupakan bentuk bantuan yang secara ketat diatur oleh pemerintah pusat.

2.1.10 Belanja Daerah

Peningkatan pengeluaran pemerintah daerah dalam investasi modal (belanja daerah) diharapkan mampu meningkatkan kualitas layanan publik dan pada gilirannya mampu meningkatkan partisipasi (kontribusi) publik terhadap pembangunan. Hal ini berarti dengan bertambahnya belanja daerah maka akan berdampak pada periode yang akan datang yaitu produktivitas masyarakat meningkat dan bertambahnya investor.

Keputusan Menteri No. 29/2002 menyebutkan bahwa belanja daerah adalah semua pengeluaran kas daerah dalam periode anggaran tertentu yang menjadi beban daerah. Pengeluaran ini dilakukan oleh pemerintah daerah untuk melaksanakan wewenang dan tanggung jawabnya kepada masyarakat dan pemerintah di atasnya (pemerintah provinsi/pemerintah pusat). Pada prakteknya belanja dibagi ke dalam dua kelompok yaitu belanja operasional (belanja aparatur daerah) dan belanja modal (belanja pelayanan publik).

a. Belanja Operasional

Belanja Operasional (belanja aparatur daerah) adalah bagian belanja berupa belanja administrasi umum, belanja operasi dan pemeliharaan, serta belanja modal yang dialokasikan untuk membiayai kegiatan yang hasil (*outcome*), manfaat (*benefit*), dan dampaknya (*impact*) tidak secara langsung dinikmati oleh masyarakat (*publik*), sehingga biasanya disebut belanja tidak langsung.

b. Belanja Modal

Belanja Modal (belanja pelayanan publik) adalah bagian belanja berupa: Belanja Administrasi Umum, Belanja Operasi dan Pemeliharaan, serta Belanja Modal/Pembangunan yang dialokasikan pada atau digunakan untuk membiayai kegiatan yang hasil (*outcome*), manfaat (*benefit*), dan dampaknya (*impact*) secara langsung dinikmati oleh masyarakat (publik), sehingga biasanya disebut belanja langsung. Belanja modal disusun atas dasar kebutuhan nyata masyarakat sesuai dengan tuntutan dan dinamika yang berkembang untuk meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat yang lebih baik.

2.1.11 Produk Domestik Regional Bruto

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan data statistik yang merangkum perolehan nilai tambah dari seluruh kegiatan ekonomi disuatu wilayah pada satu periode tertentu. PDRB dihitung dalam dua cara, yaitu atas dasar harga berlaku dan atas dasar harga konstan. Dalam menghitung PDRB atas dasar harga berlaku menggunakan harga barang dan jasa tahun berjalan, sedangkan pada PDRB atas dasar harga konstan menggunakan harga pada suatu tahun tertentu (tahun dasar). Perhitungan PDRB atas dasar harga konstan saat ini menggunakan tahun 2000 sebagai tahun dasar. Penggunaan tahun dasar ini ditetapkan secara nasional dan didefinisikan berdasarkan tiga pendekatan produksi, pendapatan dan pengeluaran (Indikator Makro Ekonomi, Pandeglang 2007), yaitu:

- a. Pendekatan Produksi (*Production Approach*)

PDRB adalah jumlah nilai tambah bruto (NTB) yang tercipta sebagai hasil proses produksi barang dan jasa yang dilakukan oleh berbagai unit produksi dalam suatu wilayah/region pada suatu jangka waktu tertentu, biasanya setahun.

$$\text{PDRB} = \text{NTB sektor 1} + \dots + \text{NTB sektor 9}$$

b. Pendekatan Pendapatan (*Income Approach*)

PDRB adalah jumlah balas jasa yang diterima oleh faktor-faktor produksi yang ikut di dalam proses produksi disuatu wilayah/region pada jangka waktu tertentu (biasanya setahun). Balas jasa faktor tersebut adalah upah dan gaji, sewa tanah, bunga modal dan keuntungan. Termasuk sebagai komponen penyusun PDRB adalah penyusutan barang modal tetap dan barang modal tidak langsung neto. Jumlah semua komponen pendapatan ini persektor disebut sebagai nilai tambah bruto sektoral. PDRB merupakan jumlah dari nilai tambah bruto seluruh sektor (lapangan usaha).

$$\text{PDRB} = \text{sewa tanah} + \text{bunga dan deviden} + \text{upah/gaji} + \text{keuntungan} + \text{pajak tidak langsung neto}$$

c. Pendekatan Pengeluaran (*Expenditure Approach*)

PDRB adalah jumlah semua pengeluaran untuk konsumsi rumah tangga dan lembaga swasta yang tidak mencari untung, konsumsi pemerintah, pembentukan modal tetap domestik bruto, perubahan inventori, dan ekspor neto di suatu wilayah pada suatu periode (biasanya setahun).

$$\text{PDRB} = \text{konsumsi (Rt + pemerintah)} + \text{investasi (PMTB)} + \Delta \text{inventori} + \text{ekspor-impor}$$

Nilai PDRB akan sama walaupun dihitung menggunakan tiga cara berbeda seperti yang telah disebutkan di atas.

Kebijakan fiskal di tingkat provinsi melalui penerimaan dan belanja pemerintah dalam APBD yang diharapkan dapat menstimulus PDRB. Penerimaan pemerintah daerah yang diperoleh dari transfer pemerintah pusat ataupun dari pendapatan asli daerah diharapkan dapat digunakan untuk aktivitas yang bersifat produktif, sedangkan pengeluaran pemerintah daerah tersebut selanjutnya dapat menstimulus perekonomian melalui peningkatan konsumsi dan investasi, karena konsumsi dan investasi merupakan komponen PDRB.

2.1.12 Uji Kausalitas Granger (*Granger Causality Test*)

Granger (1969) mempostulasikan bahwa suatu variabel X dikatakan menyebabkan variabel lain, Y, apabila Y saat ini dapat diprediksi lebih baik dengan menggunakan nilai-nilai masa lalu X.

Secara umum jika variabel X menyebabkan variabel Y maka perubahan X mendahului perubahan Y (Jonni J Manurung, 2005).

Terdapat dua arah hubungan pada Uji Kusalitas Granger, yaitu ; jika variabel X mempengaruhi variabel Y, tetapi variabel Y tidak mempengaruhi variabel X (sebaliknya), maka dikatakan mempunyai hubungan satu arah. Jika

variabel X mempengaruhi variabel Y dan sebaliknya maka dikatakan mempunyai hubungan dua arah. Dan jika tidak saling mempengaruhi antara variabel X dan Y, maka hal ini tidak mempunyai kausalitas (Haryo Kuncoro, 2007),

2.1.13 Kausalitas Antara Penerimaan Pemerintah, Belanja dan PDRB

a. Hubungan Antara Penerimaan Pemerintah terhadap Belanja Daerah

Sejak akhir dekade 1950-an dalam literatur ekonomi dan keuangan daerah, hubungan penerimaan dan belanja daerah didiskusikan secara luas, serta berbagai hipotesis tentang hubungan ini diuji secara empiris. Seperti yang dikatakan oleh Holtz-Eakin et al (1985), yang dikutip oleh Maemunah (2006), bahwa terdapat keterkaitan sangat erat antara transfer dari pemerintah pusat dengan belanja pemerintah daerah. Secara spesifik mereka menegaskan bahwa variabel-variabel kebijakan pemerintah daerah dalam jangka pendek disesuaikan dengan transfer yang diterima.

Adanya desentralisasi fiskal, pemerintah pusat mengharapkan daerah dapat mengelola sumber daya yang dimiliki sehingga tidak hanya mengandalkan dana dari pemerintah pusat. Dibeberapa daerah peran DAU sangat signifikan, karena kebijakan belanja daerah lebih didominasi oleh jumlah DAU dari pada PAD (Sidik et al, 2002). Setiap transfer yang diterima daerah akan ditujukan untuk belanja pemerintah daerah, maka tidak jarang apabila pemerintah daerah menetapkan rencana daerah secara pesimis dan rencana belanja cenderung

optimis supaya transfer DAU yang diterima daerah lebih besar (<http://www.balipost.co.id>).

Pengeluaran pemerintah daerah akan disesuaikan dengan perubahan dalam penerimaan pemerintah daerah atau perubahan penerimaan terjadi sebelum perubahan pengeluaran. Menurut Dr. Guritno Mangkoesobroto, M.Ec, perkembangan belanja pemerintah ditentukan oleh beberapa faktor, antara lain;

- a. Perubahan permintaan akan barang publik.
- b. Perubahan aktivitas dalam menghasilkan barang publik, dan juga perubahan dari kombinasi faktor produksi yang digunakan dalam proses produksi.
- c. Perubahan kualitas barang publik.
- d. Perubahan harga-harga faktor produksi.

Maemunah (2006) membuktikan adanya perilaku asimetris yang ditunjukkan oleh pengaruh DAU terhadap belanja daerah dan PAD. Besarnya proporsi DAU berpengaruh positif terhadap belanja daerah, tetapi besarnya proporsi PAD tidak berpengaruh secara signifikan terhadap belanja daerah. Hal ini menunjukkan bahwa transfer pemerintah khususnya DAU begitu dominan dalam membiayai belanja pemerintah daerah. Sedangkan Kuncoro (2007), menyebutkan bahwa peningkatan alokasi transfer diikuti dengan pertumbuhan belanja yang lebih tinggi. Hal ini dapat menunjukkan adanya indikasi bahwa peningkatan belanja yang tinggi tersebut dikarenakan inefisiensi belanja

pemerintah, terutama belanja operasional. Selain itu pada saat transfer dana dari pemerintah pusat menurun maka juga diikuti oleh penurunan belanja daerah yang melebihi penurunan PAD. Kecenderungan ini menunjukkan ketergantungan pemerintah daerah kepada pemerintah pusat masih tinggi. Dalam jangka panjang ketrgantungan ini seharusnya dikurangi, karena akan berdampak negatif pada kemandirian daerah.

b. Hubungan antara Penerimaan Pemerintah terhadap PDRB

Produk Domestik Regional Bruto pada dasarnya merupakan jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu daerah tertentu atau merupakan jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi. Peningkatan PDRB tidak lepas dari adanya peningkatan penerimaan dan pengeluaran daerah. Ketika penerimaan pemerintah baik PAD maupun transfer pemerintah pusat meningkat maka belanja daerah juga ikut meningkat, hal ini karena adanya peningkatan biaya pembangunan publik. Menurut Haryo Kuncoro (2007), strategisnya pengaruh transfer tidak bisa dilepaskan dari interaksi antara pendapatan dan alokasi belanjanya. Diantaranya adalah, pertama sampai seberapa besar proporsi transfer dialokasikan untuk membiayai berbagai jenis belanjanya. Kedua, sampai seberapa besar berbagai jenis belanja tersebut dapat menstimulasi kegiatan ekonomi regional dalam bentuk PDRB.

Belanja daerah mempengaruhi Produk Domestik Bruto (PDRB). John Due (1968) mengemukakan bahwa pemerintah dapat mempengaruhi tingkat PDRB dengan mengubah persediaan berbagai faktor yang dapat dipakai dalam produksi melalui program-program pengeluaran belanja pemerintah seperti pendidikan.

Sementara Atep Adya Barata (2004) mengatakan bahwa kegiatan yang dilakukan pemerintah yang mendorong besaran jumlah pengeluaran negara mempunyai pengaruh terhadap perekonomian masyarakat. Sehingga hal ini menunjukkan peningkatan belanja daerah akan meningkatkan PDRB.

Apabila PDRB meningkat maka akan berdampak kepada peningkatan kegiatan ekonomi, utamanya disektor riil dan dunia usaha pada umumnya. Peningkatan kegiatan ekonomi akan membawa pengaruh meningkatkan penerimaan pemerintah melalui perpajakan, karena bergairahnya perekonomian sehingga aktivitas dunia usaha meningkat dan pada akhirnya keuntungan perusahaan meningkat pula. Peningkatan aktivitas dan keuntungan perusahaan ini tentunya akan meningkatkan pemungutan pajak baik dari pajak penghasilan, pertambahan nilai maupun cukai. Jika penerimaan pemerintah meningkat, maka akan membawa konsekuensi peningkatan pengeluaran pemerintah. Peningkatan tersebut juga didasari alasan bahwa dengan peningkatan pertumbuhan ekonomi, maka menuntut peningkatan penyediaan barang publik oleh pemerintah. Dengan demikian Wagner's Law berlaku, dimana peningkatan PDRB akan mengakibatkan pengeluaran pemerintah meningkat. Sehingga akan mempunyai efek terhadap peningkatan penerimaan pemerintah.

2.2 Penelitian Terdahulu

Berbagai studi empiris yang membahas mengenai hubungan antara penerimaan, belanja dan PDRB telah banyak yang dilakukan dengan hasil yang beragam.

Haryo Kuncoro (2007) melakukan penelitian untuk menyelidiki apakah terdapat hubungan antara komponen-komponen penerimaan, belanja dan PDRB. Penelitiannya menggunakan data skunder dari BPS dan Ditjen PKPD Departemen Keuangan. Data yang diteliti merupakan data panel, yaitu data runtut waktu dan lintas daerah di Kabupaten/kota seluruh Indonesia dari tahun 1998 hingga 2003. Metode penelitian yang digunakan adalah metode Kausalitas Granger. Pada hasil analisisnya diperoleh hasil yaitu, penerimaan (Bagi Hasil dan Dana Alokasi) signifikan berpengaruh terhadap belanja daerah dan sebaliknya, sedangkan penerimaan (bagi hasil) tidak signifikan terhadap PDRB, akan tetapi PDRB berpengaruh terhadap penerimaan. Hal tersebut berarti terjadi kausalitas dua arah antara penerimaan dan belanja, dan terjadi hubungan searah PDRB menuju penerimaan.

Blackley (1986), mendukung penelitian Kuncoro bahwa kenaikan sisi penerimaan pajak berarti pemerintah sedang menghadapi defisit anggaran sebagai akibat tingkat belanja yang tinggi, bagi Blackley arah kausalitas bermula dari penerimaan pajak lalu menuju belanja. Manage dan Marlow (1986), mendapatkan fakta empiris kausalitas satu jalur di Amerika yang mengalir dari penerimaan pemerintah pusat (federal) mengarah kepada belanja. Lebih jauh, Marlow dan Manage (1987) menelaah hubungan keterkaitan antara keuangan pemerintah pusat dan pemerintah daerah, mereka menghadapi realitas tidak ada hubungan yang signifikan antara kedua variabel tersebut.

Hasil analisis ini konsisten dengan temuan-temuan sebelumnya antara lain oleh Maemunah (2006), Gunawan Wahyudi Septian (2008), David Harianto dan

Priyo Hari Adi (2007), Luky Alfirman dan Edy Sutriyono (2006) serta Novi Pratiwi Maulida (2007).

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Maemunah (2006), bahwa DAU dan PAD berpengaruh terhadap belanja yang berhubungan langsung dengan publik, yaitu belanja bidang pendidikan, kesehatan, dan pekerjaan umum. Pengujian ini dimaksudkan untuk melihat apakah pada belanja daerah sektor yang berhubungan langsung dengan masyarakat atau publik juga masih terjadi *flypaper effect* atau tidak.

Penelitian lain dilakukan oleh Gunawan Wahyudi Septian (2008), yang melakukan penelitian Pengaruh Belanja Modal terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Pendapatan Asli Daerah di Indonesia. Hasilnya menunjukkan bahwa belanja modal pada tahun lalu berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi tahun berjalan. Belanja modal mempunyai pengaruh tidak langsung terhadap PAD melalui pertumbuhan ekonomi. Hal ini dapat diinterpretasikan menjadi semakin besar pengeluaran pemerintah untuk belanja modal akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi, dengan meningkatnya pertumbuhan ekonomi ini maka akan meningkatkan PAD.

Penelitian yang sama juga dilakukan oleh David Harianto dan Priyo Hari Adi (2007), pengaruh hasil uji hipotesis menunjukkan bahwa DAU sangat berpengaruh terhadap belanja modal. Belanja modal mempunyai dampak yang signifikan dan negatif terhadap pendapatan perkapita dalam hubungan langsung, tetapi mempunyai hubungan yang positif dalam hubungan tidak langsung melalui PAD. PAD sangat berpengaruh terhadap pendapatan perkapita, tetapi

pertumbuhan yang terjadi masih kurang merata sehingga masih banyak ketimpangan antar daerah. DAU mempunyai dampak yang signifikan terhadap PAD melalui belanja modal (efek tidak langsung).

Riset tentang topik yang sama juga semakin berkembang. Luky Alfirman dan Edy Sutriyono (2006) menguji hipotesis hubungan Pengeluaran Pemerintah dan Produk Domestik Bruto dengan memanfaatkan model *Granger Causality* dan *Vector Autoregression*. Ia memperoleh kenyataan bahwa terdapat hubungan dua arah antara Produk Domestik Bruto dengan total pengeluaran pemerintah, hubungan searah antara Produk Domestik Bruto dengan pengeluaran rutin pemerintah, dan terdapat hubungan dua arah antara pengeluaran pembangunan dan Produk Domestik Bruto.

Dalam perkembangannya, penerapan uji kausalitas menyebar ke dalam suatu prediksi. Hal ini terdapat dalam analisis yang dilakukan oleh Novi Pratiwi Maulida (2007). Hasil pengujian hipotesisnya adalah diterima, artinya DAU dengan *lag* 1 tahun mempengaruhi besarnya prediksi belanja daerah. Secara singkat penelitian-penelitian diatas terangkum dalam Tabel 2.1.

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

No	Penulis dan Judul	Tujuan dan Metode Analisis	Model dan Variabel Penelitian	Hasil Empiris
1.	Haryo Kuncoro (2007), Kausalitas Antara Penerimaan, Belanja, dan	Mengetahui hubungan antar variabel penerimaan, belanja dan PDRB. Estimasi dilakukan	Model dasar: $Y_{it} = a_0 + \sum_{k=1 \rightarrow m} a_k$ $Y_{it-k} + \sum_{l=1 \rightarrow n} b_l X_{it-l} + u_{1it}$ $X_{it} = \alpha_0 + \sum_{k=1 \rightarrow m} \alpha_k$ $X_{it-k} + \sum_{l=1 \rightarrow n} \beta_l Y_{it-l} + u_{2it}$ Variabel:	1. Terdapat hubungann dua arah antara penerimaan dan belanja pemerintah. 2. Terdapat hubungan kausalitas satu arah antara penerimaan dan PDRB, PDRB

	PDRB pada Kota dan Kabupaten di Indonesia	dengan menggunakan model Kausalitas Granger.	PAD = Pendapatan Asli Daerah BH = Bagi Hasil DA = Dana Alokasi Operasional BO = Belanja Modal BM = Belanja Modal Y = Produk Domestik regional Bruto	mempengaruhi pendapatan transfer tapi tidak berlaku sebaliknya.
2.	Mutiara Maemunah (2006), Flypaper Effect pada DAU dan PAD terhadap Belanja Daerah pada Kabupaten/Kota di Pulau Sumatera.	Mengetahui pengaruh DAU dan PAD terhadap Belanja Pemerintah. Menggunakan alat analisis regresi sederhana dan regresi berganda.	$Y_i = \alpha + b_1 DAU_{1i} + e$ $Y_i = \alpha + b_2 PAD_{2i} + e$ $Y_i = \alpha + b_1 DAU_{t-1} + b_2 PAD_{2i} + e$ $Y_i = \alpha + b_1 DAU_{t-1} + b_2 PAD_{t-1} + e$ <p>Y = Jumlah belanja α = konstanta $b_1 b_2$ = koefisien regresi DAU_{1i} = jumlah DAU PAD_{2i} = jumlah PAD DAU_{t-1} = jumlah DAU dengan lag PAD_{t-1} = jumlah PAD dengan lag</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Nilai DAU dan PAD mempengaruhi besarnya nilai Belanja Daerah (positif). 2. Terjadi flypaper effect pada Belanja Daerah. 3. Flypaper effect dalam memprediksi Belanja daerah periode kedepan diterima. 4. Tidak terdapat perbedaan flypaper effect baik pada daerah yang PADnya tinggi atau rendah.
3.	David Harianto dan Priyo Hari Adi (2007), Hubungan Antara DAU, Belanja Modal, PAD dan Pendapatan Perkapita.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengetahui hubungan DAU dengan BM. 2. Mengetahui hubungan BM dengan PAD 3. Mengetahui hubungan BM dengan pendapatan perkapita 4. Mengetahui hubungan PAD dengan pendapatn perkapita. <p>Menggunakan alat analisis Diskriptif dan Analisis Jalur (Path Analysis)</p>	<p>Analisis Diskriptif : menggunakan alat-alat seperti rata-rata nilai maksimum dan minimum dan standar deviasi.</p> <p>Analisis Diskriptif untuk memberikan gambaran awal tentang DAU, Belanja Modal, PAD dan pendapatan perkapita.</p> <p>Analisi Jalur: digunakan untuk menguji hipotesis 1-4.</p> <p>Analisis Jalur digunakan untuk menguji pengaruh simultan sebuah variabel terhadap variabel lain. Sebelum dilakukan pengujian ini, perlu untuk melakukan pengujian asumsi klasik.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Hasil uji hipotesis menunjukkan bahwa DAU sangat berpengaruh terhadap belanja modal. Sayangnya, kontribusi DAU terhadap belanja modal kurang efektif akibatnya pembangunan yang terjadi kurang merata, masih banyak desa terbelakan (Jawa dan Bali). 2. Belanja Modal mempunyai dampak signifikan dan negatif terhadap pendapatan perkapita secara langsung. Tetapi mempunyai hubungan positif secara tidak langsung melalui PAD. 3. PAD berpengaruh terhadap pendapatan perkapita, tetapi pertumbuhannya kurang merata sehingga banyak ketimpangan antar daerah. 4. DAU mempunyai dampak signifikan terhadap PAD secara tidak langsung (melalui belanja modal).
4.	Novi Pratiwi Maulida (2007), Pengaruh DAU dan PAD terhadap	1. Mengetahui pengaruh DAU dan PAD terhadap prediksi belanja daerah	$H_1: Y_i = \alpha + b_1 DAU_{1i} + e$ $H_2: Y_i = \alpha + b_2 PAD_{2i} + e$ $H_3: Y_i = \alpha + b_1 DAU_{1i} + b_2 PAD_{2i} + e$	<ol style="list-style-type: none"> 1. Hasil H_1: diterima, artinya DAU dengan lag 1 tahun (DAU_{t-1}) mempengaruhi besarnya prediksi belanja daerah. 2. H_2: diterima, artinya PAD

	Prediksi Belanja Daerah (studi Kasus pada Kabupaten/Kota di Indonesia)	2. Mengetahui kemungkinan terjadi <i>flypaper effect</i> pada belanja daerah.	$Y = \text{jumlah belanja daerah}$ $\alpha = \text{Konstanta}$ $b_1, b_2 = \text{koefisien regresi}$ $DAU_{1i} = \text{jumlah DAU}_{t-1}$ $PAD_{2i} = \text{jumlah PAD}_{t-1}$ $e = \text{error term}$	<p>dengan lag 1 tahun (PAD_{t-1}) mempengaruhi prediksi belanja daerah.</p> <p>3. Apabila dilakukan secara serempak tampak bahwa pengaruh DAU_{t-1} lebih kuat dari pada pengaruh PAD_{t-1}, hal tersebut membuktikan bahwa terjadi <i>flypaper effect</i> pada belanja daerah di Indonesia, dengan demikian H_3 juga diterima.</p>
5.	Luky Alfirman dan Edy Sutriono (2006) Analisis Hubungan Pengeluaran Pemerintah dan PDB dengan Menggunakan Pendekatan Granger Causality dan Vektor Autoregression	<p>1. Mengetahui hubungan antara pengeluaran pemerintah dengan PDB.</p> <p>2. Mengetahui hubungan tersebut, searah atau timbal balik antara pengeluaran pemerintah dengan PDB.</p> <p>3. Mengetahui hubungan perjenis pengeluaran pemerintah (pengeluaran rutin dan pembangunan) dengan PDB.</p>	$Y_t = 0 + \alpha_1 Y_{t-1} + \dots + \alpha_n Y_{t-n} + \beta_1 X_{t-1} + \dots + \beta_n X_{t-n} + \varepsilon_t$ $X_t = 0 + \alpha_1 X_{t-1} + \dots + \alpha_n X_{t-n} + \beta_1 Y_{t-1} + \dots + \beta_n Y_{t-n} + u_t$ $Y_t = \text{variabel penerimaan pemerintah}$ $X_t = \text{variabel pengeluaran pemerintah}$ $M, n = \text{jumlah lag}$ $\varepsilon_t, u_t = \text{variabel pengganggu}$ $\alpha = \text{koefisien regresi untuk memprediksi}$ $\beta = \text{koefisien regresi untuk arah kausalits}$	<p>1. Terdapat hubungan timbal balik antara PDB dengan total pengeluaran pemerintah.</p> <p>2. Terdapat hubungan searah antara PDB dengan pengeluaran rutin pemerintah.</p> <p>3. Terdapat hubungan timbal balik antara pengeluaran pembangunan dan PDB.</p>

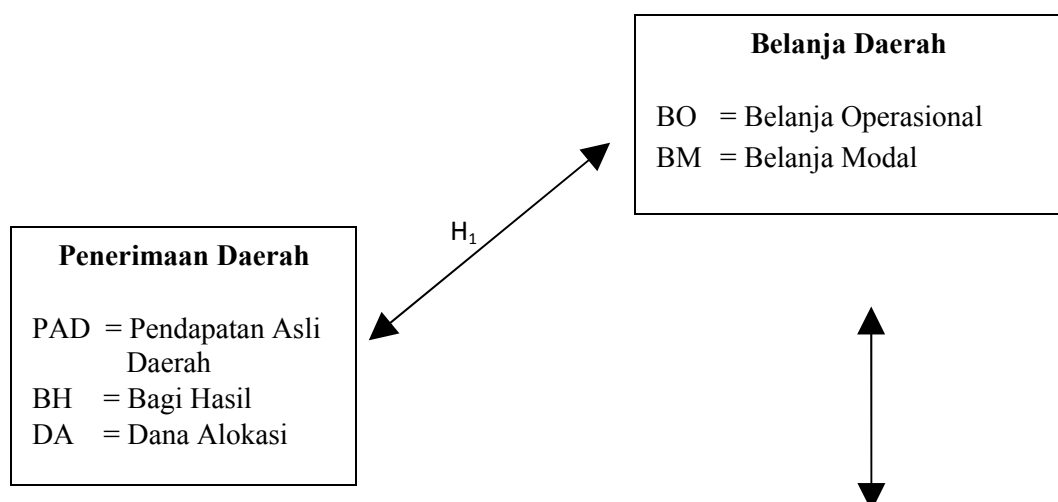
Penelitian ini dilakukan untuk meneliti kembali penelitian yang dilakukan Haryo Kuncoro (2007). Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah pada penelitian yang dilakukan Haryo Kuncoro menggunakan periode sebelum dan sesudah otonomi daerah (1988-2003). Sedangkan penelitian ini menggunakan periode tahun 2001-2008, setelah otonomi daerah.

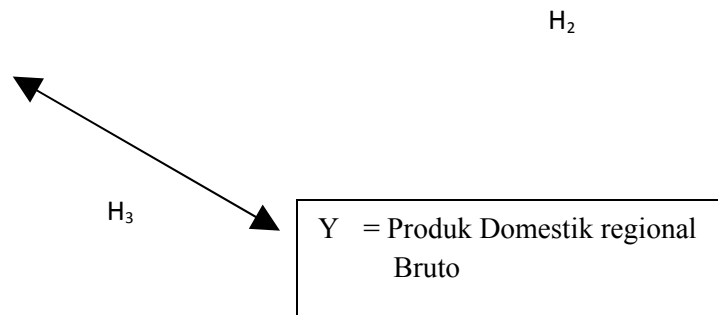
2.3 Kerangka Pemikiran

Penerimaan daerah selain diperoleh dari Pendapatan Asli Daerah juga sebagian besar didapat dari transfer pemerintah pusat, yang merupakan sumber utama bagi penerimaan pemerintah daerah. Transfer pemerintah berupa Dana Alokasi dan Bagi Hasil akan mempengaruhi belanja daerah dalam menyediakan barang-barang publik dan upaya pajak daerah sebagai bentuk perilaku fiskal masyarakat dalam merespon adanya peningkatan barang publik tersebut. Adanya peningkatan belanja barang publik akan menstimulus peningkatan PDRB, karena PDRB merupakan proksi kemampuan masyarakat dalam mengkonsumsi barang-barang publik. Jadi, semakin banyak pemerintah meningkatkan belanja barang publik, maka akan semakin banyak peningkatan barang publik yang terbentuk dalam PDRB.

Berdasarkan landasan teori dan penelitian terdahulu maka penelitian ini dapat disusun ke dalam bentuk Kerangka Pemikiran Teori. Untuk melihat model penelitian yang akan dilakukan oleh penulis, tentang kausalitas antara Penerimaan, Belanja dan PDRB Kabupaten/Kota di Indonesia (Periode Setelah Otonomi Daerah) dapat dilihat dalam kerangka pemikiran sebagai berikut ini :

Gambar 2.3
Kerangka Pemikiran





(Haryo Kuncoro, 2007)

Objek utama penelitian ini adalah melihat bagaimanakah hubungan antara variabel yang terdapat pada penerimaan pemerintah daerah, belanja daerah dan PDRB. Paradigma penelitian pada penelitian di atas memperlihatkan bahwa PDRB dipengaruhi oleh penerimaan pemerintah daerah. Penerimaan pemerintah juga akan mempengaruhi Belanja Daerah dan akhirnya mempengaruhi PDRB.

2.4 Hipotesis

Berdasarkan teori dan permasalahan yang telah diuraikan sebelumnya, maka dapat diajukan hipotesis penelitian sebagai berikut.

1. Hipotesis 1 (H_1), terdapat kausalitas antara penerimaan dan belanja daerah.
2. Hipotesis 2 (H_2), terdapat kausalitas antara belanja daerah dengan PDRB.
3. Hipotesis 3 (H_3), terdapat kausalitas antara penerimaan dan PDRB.

BAB III

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam bab ini adalah studi kasus dengan menggunakan data skunder sehingga pengumpulan data tidak memerlukan teknik sampling dan kuesioner. Data diperoleh dari instansi-instansi terkait dan metode analisis dalam penelitian ini menggunakan analisis kuantitatif serta bentuk

umum model *vector autoregresif* dengan menggunakan data panel, sehingga dapat diketahui variabel penelitian dan definisi operasional dari metode analisis yang digunakan.

3.1 Variabel Penelitian dan Definisi Operasional Variabel

Definisi operasional adalah suatu definisi yang diberikan kepada suatu variabel atau konstruk dengan cara memberikan arti atau menspesifikasikan kegiatan, ataupun memberikan suatu operasional yang diberikan untuk mengukur konstruk atau variabel tersebut (M. Nasir, 1998). Definisi operasional sebagai panduan untuk mengurangi dan menghindari terjadinya kekaburan dalam pembahasan masing-masing variabel yang dibahas. Berdasarkan penelitian Haryo Kuncoro (2007), definisi variabel penelitiannya antara lain sebagai berikut:

1. Penerimaan Daerah

Penerimaan Daerah merupakan jumlah seluruh pendapatan yang diterima oleh daerah tersebut yang diperoleh dari daerah itu sendiri ataupun dari pemerintah, yang terdiri atas Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan (Dana Alokasi dan Dana Bagi Hasil), serta pendapatan yang diterima dari penerimaan pembiayaan daerah. Penerimaan daerah menggunakan satuan juta rupiah.

a. Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah, ditulis menggunakan satuan riil per kapita (juta rupiah). Penerimaan daerah yang berasal dari

sumber ekonomi asli daerah tersebut dipisahkan menjadi empat jenis pendapatan, yaitu: Pajak daerah, Retribusi daerah, Hasil perusahaan milik daerah (BUMD), dan hasil pengelolaan kekayaan milik daerah yang dipisahkan, Lain-lain PAD yang sah.

b. Dana Perimbangan

Dana perimbangan adalah total transfer pemerintah pusat yang terdiri dari dana bagi hasil pajak dan bukan pajak, dan transfer dana alokasi. Dana perimbangan menggunakan satuan juta rupiah. Variabel dana perimbangan ada dua, dan didefinisikan sebagai berikut:

1. Dana Bagi Hasil (BH)

Dana Bagi Hasil yaitu dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi (Undang-Undang No. 33 Tahun 2004). dana bagi hasil diperoleh dari penerimaan pajak dan bukan pajak dengan menggunakan satuan juta rupiah.

2. Dana Alokasi (DA)

Dana Alokasi yaitu jumlah transfer dari pemerintah pusat berupa Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus, menggunakan satuan juta rupiah.

2. Pengeluaran Daerah

Pengeluaran daerah adalah semua pengeluaran daerah pada suatu periode anggaran yang terdiri atas belanja operasional dan belanja modal. Pengeluaran daerah menggunakan satuan juta rupiah. Total belanja ini terdapat dua kategori, yaitu:

a. Belanja Operasional

Kelompok belanja ini merupakan semua belanja pemerintah daerah yang berhubungan dengan masyarakat. Belanja operasional meliputi belanja pegawai/personalia, belanja barang dan jasa, belanja perjalanan dinas, dan belanja pemeliharaan. Belanja Operasional dinotasikan dengan BO, menggunakan satuan juta rupiah.

b. Belanja Modal

Belanja Modal merupakan belanja pemerintah daerah yang manfaatnya melebihi satu anggaran yang akan menambah aset atau kekayaan daerah dan manfaatnya akan dirasakan langsung oleh masyarakat. Belanja Modal dinotasikan dengan BO, menggunakan satuan juta rupiah.

3. Produk Domestik Regional Bruto

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) adalah data statistik yang merangkum perolehan nilai tambah dari seluruh kegiatan ekonomi disuatu wilayah pada satu periode tertentu. PDRB dalam penelitian ini tanpa minyak dan gas bumi, dan perhitungannya didasarkan atas harga konstan menurut kabupaten/kota. PDRB dinotasikan dengan Y (pendapatan masyarakat), menggunakan satuan juta rupiah.

3.2 Populasi dan Sampel

Populasi adalah keseluruhan objek yang akan diteliti dalam penelitian. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh kabupaten/kota seluruh Indonesia dari tahun 2001 sampai dengan tahun 2008.

Adanya pemekaran wilayah atau pembentukan daerah otonom baru, sejak disahkannya UU No. 22 Tahun 1999 tentang Otonomi Daerah yang kemudian direvisi menjadi UU No. 32 Tahun 2004. Hingga Juni 2009 telah terbentuk 530 daerah otonom yang terdiri dari 33 provinsi, 399 kabupaten, dan 98 kota yang tersebar di 33 provinsi di Indonesia (sumber: Data Depdagri). Sampel yang digunakan 497 kabupaten/kota, hanya daerah non pemekaran. Atas dasar pertimbangan ini terkumpul 280 kabupaten/kota, karena ada pertimbangan lain yaitu tidak mengikutkan daerah yang tidak menyertakan realisasi APBD dan PDRBnya maka sampel akhir mencapai 178 kabupaten/kota. Sampel ini mencapai 65 persen atas jumlah kabupaten/kota *non* pemekaran seluruh Indonesia.

Di Indonesia terjadi penggabungan, penghapusan dan pembentukan daerah yang baru selama kurun waktu lima tahun (tahun 2001 sampai tahun 2005), maka sampel yang digunakan dalam penelitian ini yaitu daerah kabupaten/kota yang memenuhi kriteria sebagai berikut:

1. Pemerintah daerah kabupaten/kota yang berada di Indonesia
2. Pemerintah daerah kabupaten/kota yang menyertakan Laporan Realisasi APBD dan PDRB atas harga konstan dari tahun 2001 sampai 2008.

3.3 Jenis dan Sumber Data

3.3.1 Jenis Data

Jenis data yang diperlukan dalam penelitian ini seluruhnya adalah data kuantitatif untuk periode tahun 2001 sampai 2008. Data sekunder adalah data yang telah tersedia dan telah diproses oleh pihak-pihak lain sebagai hasil atas penelitian yang telah dilakukan.

Data yang digunakan yaitu, Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah diseluruh pemerintah kabupaten/kota di Indonesia dan data PDRB atas dasar harga konstan menurut kabupaten/kota.

Penulis memilih objek penelitian diseluruh kabupaten/kota di Indonesia karena negara Indonesia adalah negara kepulauan yang memiliki banyak kota dan kabupaten dan menyebar diberbagai pulau, sehingga perlu dilakukan penelitian untuk mengetahui pengelolaan keuangan pemerintahan daerah di Indonesia yang diharapkan dapat menjadi masukan bagi pemerintah untuk mewujudkan pemerataan desentralisasi fiskal diseluruh Indonesia.

3.3.2 Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini adalah data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang berupa laporan realisasi penerimaan dan belanja daerah dari masing-masing

kabupaten/kota dan data PDRB atas harga konstan menurut kabupaten/kota tahun 2001 sampai 2008. Data diperoleh melalui Biro Pusat Statistik (BPS), akses internet dari portal Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (www.djpk.depkeu.go.id), Direktorat Jenderal Anggaran (www.anggaran.depkeu.go.id) dan www.datastatistik-indonesia.com serta Statistik Indonesia (www.bps.go.id).

Data yang diambil adalah data seluruh kabupaten/kota yang mempunyai laporan realisasi APBD, maka data yang terkumpul sebanyak 178 kabupaten/kota. Tahun yang dipilih adalah tahun 2001 sampai dengan tahun 2008, sehingga data *time series* sebanyak 8 tahun, sedangkan data *cross section* diambil sebanyak 178 kabupaten/kota. Jenis data yang digunakan dalam studi ini adalah data panel, yaitu kombinasi dari data *time series* dan data *cross section*.

3.4 Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pengumpulan data melalui studi kepustakaan dari buku-buku, bahan-bahan laporan instansi-instansi serta sumber-sumber yang dihimpun dari pihak lain. Cara pemilihan data dilakukan secara tidak random atau bersifat *purposive*. *Purposive sampling* adalah penentuan sampel berdasarkan kriteria tertentu sesuai dengan yang dikehendaki oleh peneliti. Penentuan kriteria sampel dilakukan untuk menghindari salah spesifikasi (*misspesification*) dalam penentuan sampel penelitian yang selanjutnya akan berpengaruh terhadap hasil analisis, selain itu penentuan sampel berdasarkan *purposive* ini dilakukan dengan tujuan untuk

memperoleh sampel yang representatif berdasarkan kriteria yang telah ditentukan di atas.

3.5 Metode Analisis Data

Metode analisis dalam penelitian ini menggunakan analisis kuantitatif dengan menggunakan data panel. Model analisis yang digunakan untuk meneliti hubungan kausalitas antara penerimaan, belanja dan PDRB kabupaten/kota di Indonesia adalah uji Kausalitas Granger. Penggunaan Uji Kausalitas Granger untuk mengetahui adanya hubungan timbal balik antara variabel-variabel ekonomi, dimana satu sisi suatu *dependent variable* (variabel tidak bebas) dapat dipengaruhi variabel lain (*independent variable*) dan disisi lain *independent variable* tersebut dapat menempati posisi *dependent variable*. Hubungan tersebut sering disebut hubungan timbal balik (M. Wahyudin dan Eny Widatik, 2004).

3.6 Pengujian Kausalitas

Estimasi model regresi dengan data panel dalam penelitian ini akan menggunakan pendekatan *Granger Causality*. *Granger Causality* yaitu pendekatan yang mempostulasikan bahwa suatu variabel X menyebabkan variabel lain Y, apabila Y saat ini dapat memprediksi lebih baik dengan menggunakan nilai-nilai masa lalu variabel X (Granger, 1996).

1. Mengikuti Holtz-Eakin, Newey dan Rosen, uji kausalitas Granger diformulasikan dengan bentuk umum model *vector autoregressive* (Haryo Kuncoro, 2007) sebagai berikut :

$$Y_{it} = a_0 + \sum_{k=1 \rightarrow m} a_k Y_{it-k} + \sum_{l=1 \rightarrow n} b_l X_{it-l} + u_{1it} \quad (3.1)$$

$$X_{it} = \alpha_0 + \sum_{k=1 \rightarrow m} \alpha_k X_{it-k} + \sum_{l=1 \rightarrow n} \beta_l Y_{it-l} + u_{2it} \quad (3.2)$$

Evaluasi statistik atas koefisien-koefisien b_1 dan β_1 akan memberikan 4 kemungkinan hasil:

- a. Jika b_1 signifikan ($b_1 \neq 0$) dan β_1 tidak signifikan ($\beta_1 = 0$), maka terdapat kausalitas satu arah dari variabel Y menuju variabel X.
 - b. Jika b_1 tidak signifikan ($b_1 = 0$) dan β_1 signifikan ($\beta_1 \neq 0$), maka terdapat kausalitas satu arah dari variabel X menuju variabel Y.
 - c. Jika b_1 dan β_1 signifikan ($b_1, \beta_1 \neq 0$), maka terdapat kausalitas dua arah dari variabel X menuju variabel Y, atau sebaliknya.
 - d. Jika b_1 dan β_1 tidak signifikan ($b_1, \beta_1 = 0$), maka tidak terdapat kausalitas dua arah dari variabel X menuju variabel Y, atau sebaliknya.
2. Persamaan yang kedua yaitu bentuk persamaan tidak berkendala/*unrestricted residual sum of squares (URSS)*, merupakan diferensiasi tingkat pertama untuk mengeliminasi efek individual yang selalu muncul dalam data panel. Model persamaanya dengan meregresi Y dengan semua lag Y dan X, dari hasil regresi diperoleh sebagai berikut :

$$\Delta Y_{it} = a_0 + \sum_{k=1 \rightarrow m} a_k \Delta Y_{it-k} + \sum_{l=1 \rightarrow n} b_l \Delta X_{it-l} + \Delta u_{1it} \quad (3.3)$$

$$\Delta X_{it} = \alpha_0 + \sum_{k=1 \rightarrow m} \alpha_k \Delta X_{it-k} + \sum_{l=1 \rightarrow n} \beta_l \Delta Y_{it-l} + \Delta u_{2it} \quad (3.4)$$

3. Pengujian koefisien b_1 dan β_1 akan dilakukan secara serempak dengan meregresikan Y pada semua lag Y dan variabel lainnya, tetapi tidak mencakup variabel lag dari X , dari hasil regresi diperoleh persamaan berkendala/*restricted residual sum of squares (RRSS)*. Bentuk persamaannya sebagai berikut :

$$\Delta Y_{it} = a_0 + \sum_{k=1 \rightarrow m} a_k \Delta Y_{it-k} + \Delta u_{1it} \quad (3.5)$$

$$\Delta X_{it} = \alpha_0 + \sum_{k=1 \rightarrow m} \alpha_k \Delta X_{it-k} + \Delta u_{2it} \quad (3.6)$$

Keterangan :

Y = variabel Y

X = variabel X

m, n = jumlah lag

u_{1it}, u_{2it} = variabel pengganggu

a_k, α_k = koefisien regresi yang membantu memperkirakan perubahan suatu variabel atas dasar informasi yang terjadi pada masa lalu.

b_1, β_1 = koefisien regresi yang menyediakan informasi mengenai arah kausalitas.

i, t = subskrip yang menyatakan daerah dan waktu.

4. Tahap selanjutnya menggunakan uji hipotesis nol dengan statistik F , yang ditempuh dengan membandingkan nilai jumlah residual kuadrat yang

diperoleh pada dua model estimasi yang berbeda, formula pengujian untuk kedua pasang persamaan di atas adalah sebagai berikut :

$$F = \frac{(RRSS-URSS)/m}{URSS/(N-k)} \quad (3.7)$$

(Jonni J Manurung, hal 241, 2005)

Keterangan :

F = uji hipotesis nol.

RRSS = persamaan berkendala/*restricted residual sum of squares*.

URSS = persamaan tidak berkendala/*unrestricted residual sum of squares*.

m = jumlah lag pada variabel independen.

N = jumlah data yang diobservasi.

k = jumlah parameter yang ditaksir pada regresi yang direstriksi.

5. Jika perhitungan statistik F lebih besar dari nilai kritis F, maka hipotesis nol ditolak atau koefisien lag X dicakup dalam model. Artinya X menyebabkan Y.
6. Jika perhitungan statistik F lebih kecil dari nilai kritis F, maka hipotesis nol diterima atau koefisien lag Y dicakup dalam model. Artinya Y menyebabkan X.

7. Langkah 3.1, 3.3, 3.5 untuk menguji X menyebabkan Y, langkah 3.2, 3.4, 3.6 untuk menguji Y menyebabkan X.

3.7 Pengujian Arah Kausalitas

3.7.1 Pengujian Arah Kausalitas Penerimaan terhadap Belanja

a. $BO \rightarrow PAD, PAD \rightarrow BO$

- 1) Model dasar;

$$BO_{it} = a_0 + \sum_{k=1 \rightarrow m} a_k BO_{it-k} + \sum_{l=1 \rightarrow n} b_l PAD_{it-l} + u_{1i} \quad (3.8)$$

$$PAD_{it} = \alpha_0 + \sum_{k=1 \rightarrow m} \alpha_k PAD_{it-k} + \sum_{l=1 \rightarrow n} \beta_l BO_{it-l} + u_{2it} \quad (3.9)$$

- 2) Bentuk persamaan tidak berkendala/*unrestricted residual sum of squares (URSS)*

$$\Delta BO_{it} = a_0 + \sum_{k=1 \rightarrow m} a_k \Delta BO_{it-k} + \sum_{l=1 \rightarrow n} b_l \Delta PAD_{it-l} + \Delta u_{1it} \quad (3.10)$$

$$\Delta PAD_{it} = \alpha_0 + \sum_{k=1 \rightarrow m} \alpha_k \Delta PAD_{it-k} + \sum_{l=1 \rightarrow n} \beta_l \Delta BO_{it-l} + \Delta u_{2it} \quad (3.11)$$

- 3) Bentuk persamaan berkendala/*restricted residual sum of squares (RRSS)*

$$\Delta BO_{it} = a_0 + \sum_{k=1 \rightarrow m} a_k \Delta BO_{it-k} + \Delta u_{1it} \quad (3.12)$$

$$\Delta PAD_{it} = \alpha_0 + \sum_{k=1 \rightarrow m} \alpha_k \Delta PAD_{it-k} + \Delta u_{2it} \quad (3.13)$$

- 4) Uji hipotesis nol dengan statistik F

$$F = \frac{(RRSS - URSS)/m}{URSS/(N-k)} \quad (3.14)$$

b. BM → PAD, PAD → BM

- 1) Model dasar;

$$BM_{it} = a_0 + \sum_{k=1 \rightarrow m} a_k BM_{it-k} + \sum_{l=1 \rightarrow n} b_l PAD_{it-l} + u_{1it} \quad (3.15)$$

$$PAD_{it} = \alpha_0 + \sum_{k=1 \rightarrow m} \alpha_k PAD_{it-k} + \sum_{l=1 \rightarrow n} \beta_l BM_{it-l} + u_{2it} \quad (3.16)$$

- 2) Bentuk persamaan tidak berkendala/*unrestricted residual sum of squares (URSS)*

$$\Delta BM_{it} = a_0 + \sum_{k=1 \rightarrow m} a_k \Delta BM_{it-k} + \sum_{l=1 \rightarrow n} b_l \Delta PAD_{it-l} + \Delta u_{1it} \quad (3.17)$$

$$\Delta PAD_{it} = \alpha_0 + \sum_{k=1 \rightarrow m} \alpha_k \Delta PAD_{it-k} + \sum_{l=1 \rightarrow n} \beta_l \Delta BM_{it-l} + \Delta u_{2it} \quad (3.18)$$

- 3) Bentuk persamaan berkendala/*restricted residual sum of squares (RRSS)*

$$\Delta BM_{it} = a_0 + \sum_{k=1 \rightarrow m} a_k \Delta BM_{it-k} + \Delta u_{1it} \quad (3.19)$$

$$\Delta PAD_{it} = \alpha_0 + \sum_{k=1 \rightarrow m} \alpha_k \Delta PAD_{it-k} + \Delta u_{2it} \quad (3.20)$$

- 4) Uji hipotesis nol dengan statistik F

$$F = \frac{(RRSS - URSS)/m}{URSS/(N - k)} \quad (3.21)$$

c. BH \rightarrow BO, BO \rightarrow BH

- 1) Model dasar;

$$BH_{it} = a_0 + \sum_{k=1 \rightarrow m} a_k BH_{it-k} + \sum_{l=1 \rightarrow n} b_l BO_{it-l} + u_{1it} \quad (3.22)$$

$$BO_{it} = \alpha_0 + \sum_{k=1 \rightarrow m} \alpha_k BO_{it-k} + \sum_{l=1 \rightarrow n} \beta_l BH_{it-l} + u_{2it} \quad (3.23)$$

- 2) Bentuk persamaan tidak berkendala/*unrestricted residual sum of squares (URSS)*

$$\Delta BH_{it} = a_0 + \sum_{k=1 \rightarrow m} a_k \Delta BH_{it-k} + \sum_{l=1 \rightarrow n} b_l \Delta BO_{it-l} + \Delta u_{1it} \quad (3.24)$$

$$\Delta BO_{it} = \alpha_0 + \sum_{k=1 \rightarrow m} \alpha_k \Delta BO_{it-k} + \sum_{l=1 \rightarrow n} \beta_l \Delta BH_{it-l} + \Delta u_{2it} \quad (3.25)$$

- 3) Bentuk persamaan berkendala/*restricted residual sum of squares (RRSS)*

$$\Delta BH_{it} = a_0 + \sum_{k=1 \rightarrow m} a_k \Delta BH_{it-k} + \Delta u_{1it} \quad (3.26)$$

$$\Delta BO_{it} = \alpha_0 + \sum_{k=1 \rightarrow m} \alpha_k \Delta BO_{it-k} + \Delta u_{2it} \quad (3.27)$$

4) Uji hipotesis nol dengan statistik F

$$F = \frac{(RRSS - URSS)/m}{URSS/(N-k)} \quad (3.28)$$

d. DA → BO, BO → DA

1) Model dasar;

$$DA_{it} = a_0 + \sum_{k=1 \rightarrow m} a_k DA_{it-k} + \sum_{l=1 \rightarrow n} b_l BO_{it-l} + u_{1it} \quad (3.29)$$

$$BO_{it} = \alpha_0 + \sum_{k=1 \rightarrow m} \alpha_k BO_{it-k} + \sum_{l=1 \rightarrow n} \beta_l DA_{it-l} + u_{2it} \quad (3.30)$$

2) Bentuk persamaan tidak berkendala/*unrestricted residual sum of squares (URSS)*

$$\Delta DA_{it} = a_0 + \sum_{k=1 \rightarrow m} a_k \Delta DA_{it-k} + \sum_{l=1 \rightarrow n} b_l \Delta BO_{it-l} + \Delta u_{1it} \quad (3.31)$$

$$\Delta BO_{it} = \alpha_0 + \sum_{k=1 \rightarrow m} \alpha_k \Delta BO_{it-k} + \sum_{l=1 \rightarrow n} \beta_l \Delta DA_{it-l} + \Delta u_{2it} \quad (3.32)$$

3) Bentuk persamaan berkendala/*restricted residual sum of squares (RRSS)*

$$\Delta DA_{it} = a_0 + \sum_{k=1 \rightarrow m} a_k \Delta DA_{it-k} + \Delta u_{1it} \quad (3.33)$$

$$\Delta BO_{it} = \alpha_0 + \sum_{k=1 \rightarrow m} \alpha_k \Delta BO_{it-k} + \Delta u_{2it} \quad (3.34)$$

4) Uji hipotesis nol dengan statistik F

$$F = \frac{(RRSS - URSS)/m}{URSS/(N-k)} \quad (3.35)$$

e. BH → BM, BM → BH

1) Model dasar;

$$BH_{it} = a_0 + \sum_{k=1 \rightarrow m} a_k BH_{it-k} + \sum_{l=1 \rightarrow n} b_l BM_{it-l} + u_{1it} \quad (3.36)$$

$$BM_{it} = \alpha_0 + \sum_{k=1 \rightarrow m} \alpha_k BM_{it-k} + \sum_{l=1 \rightarrow n} \beta_l BH_{it-l} + u_{2it} \quad (3.37)$$

2) Bentuk persamaan tidak berkendala/*unrestricted residual sum of squares (URSS)*

$$\Delta BH_{it} = a_0 + \sum_{k=1 \rightarrow m} a_k \Delta BH_{it-k} + \sum_{l=1 \rightarrow n} b_l \Delta BM_{it-l} + \Delta u_{1it} \quad (3.38)$$

$$\Delta BM_{it} = \alpha_0 + \sum_{k=1 \rightarrow m} \alpha_k \Delta BM_{it-k} + \sum_{l=1 \rightarrow n} \beta_l \Delta BH_{it-l} + \Delta u_{2it} \quad (3.39)$$

3) Bentuk persamaan berkendala/*restricted residual sum of squares (RRSS)*

$$\Delta BH_{it} = a_0 + \sum_{k=1 \rightarrow m} a_k \Delta BH_{it-k} + \Delta u_{1it} \quad (3.40)$$

$$\Delta BM_{it} = \alpha_0 + \sum_{k=1 \rightarrow m} \alpha_k \Delta BM_{it-k} + \Delta u_{2it} \quad (3.41)$$

4) Uji hipotesis nol dengan statistik F

$$F = \frac{(RRSS - URSS)/m}{URSS/(N-k)} \quad (3.42)$$

f. DA → BM, BM → DA

1) Model dasar;

$$DA_{it} = a_0 + \sum_{k=1 \rightarrow m} a_k DA_{it-k} + \sum_{1-1 \rightarrow n} b_1 BM_{it-1} + u_{1it} \quad (3.43)$$

$$BM_{it} = \alpha_0 + \sum_{k=1 \rightarrow m} \alpha_k BM_{it-k} + \sum_{1-1 \rightarrow n} \beta_1 DA_{it-1} + u_{2it} \quad (3.44)$$

2) Bentuk persamaan tidak berkendala/*unrestricted residual sum of squares (URSS)*

$$\Delta DA_{it} = a_0 + \sum_{k=1 \rightarrow m} a_k \Delta DA_{it-k} + \sum_{1-1 \rightarrow n} b_1 \Delta BM_{it-1} + \Delta u_{1it} \quad (3.45)$$

$$\Delta BM_{it} = \alpha_0 + \sum_{k=1 \rightarrow m} \alpha_k \Delta BM_{it-k} + \sum_{1-1 \rightarrow n} \beta_1 \Delta DA_{it-1} + \Delta u_{2it} \quad (3.46)$$

3) Bentuk persamaan berkendala/*restricted residual sum of squares (RRSS)*

$$\Delta DA_{it} = a_0 + \sum_{k=1 \rightarrow m} a_k \Delta DA_{it-k} + \Delta u_{1it} \quad (3.47)$$

$$\Delta BM_{it} = \alpha_0 + \sum_{k=1 \rightarrow m} \alpha_k \Delta BM_{it-k} + \Delta u_{2it} \quad (3.48)$$

4) Uji hipotesis nol dengan statistik F

$$F = \frac{(RRSS - URSS)/m}{URSS/(N-k)} \quad (3.49)$$

3.7.2 Pengujian Arah Kausalitas Belanja terhadap PDRB

a. **BO → Y, Y → BO**

1) Model dasar;

$$BO_{it} = a_0 + \sum_{k=1 \rightarrow m} a_k BO_{it-k} + \sum_{l=1 \rightarrow n} b_l Y_{it-l} + u_{1it} \quad (3.50)$$

$$Y_{it} = \alpha_0 + \sum_{k=1 \rightarrow m} \alpha_k Y_{it-k} + \sum_{l=1 \rightarrow n} \beta_l BO_{it-l} + u_{2it} \quad (3.51)$$

- 2) Bentuk persamaan tidak berkendala/*unrestricted residual sum of squares (URSS)*

$$\Delta BO_{it} = a_0 + \sum_{k=1 \rightarrow m} a_k \Delta BO_{it-k} + \sum_{l=1 \rightarrow n} b_l \Delta Y_{it-l} + \Delta u_{1it} \quad (3.52)$$

$$\Delta Y_{it} = \alpha_0 + \sum_{k=1 \rightarrow m} \alpha_k \Delta Y_{it-k} + \sum_{l=1 \rightarrow n} \beta_l \Delta BO_{it-l} + \Delta u_{2it} \quad (3.53)$$

- 3) Bentuk persamaan berkendala/*restricted residual sum of squares (RRSS)*

$$\Delta BO_{it} = a_0 + \sum_{k=1 \rightarrow m} a_k \Delta BO_{it-k} + \Delta u_{1it} \quad (3.54)$$

$$\Delta Y_{it} = \alpha_0 + \sum_{k=1 \rightarrow m} \alpha_k \Delta Y_{it-k} + \Delta u_{2it} \quad (3.55)$$

- 4) Uji hipotesis nol dengan statistik F

$$F = \frac{(RRSS - URSS)/m}{URSS/(N - k)} \quad (3.56)$$

b. BM \rightarrow Y, Y \rightarrow BM

- 1) Model dasar :

$$BM_{it} = a_0 + \sum_{k=1 \rightarrow m} a_k BM_{it-k} + \sum_{l=1 \rightarrow n} b_l Y_{it-l} + u_{1it} \quad (3.57)$$

$$Y_{it} = \alpha_0 + \sum_{k=1 \rightarrow m} \alpha_k Y_{it-k} + \sum_{l=1 \rightarrow n} \beta_l BM_{it-l} + u_{2it} \quad (3.58)$$

- 2) Bentuk persamaan tidak berkendala/*unrestricted residual sum of squares (URSS)*

$$\Delta BM_{it} = a_0 + \sum_{k=1 \rightarrow m} a_k \Delta BM_{it-k} + \sum_{l=1 \rightarrow n} b_l \Delta Y_{it-l} + \Delta u_{1it} \quad (3.59)$$

$$\Delta Y_{it} = \alpha_0 + \sum_{k=1 \rightarrow m} \alpha_k \Delta Y_{it-k} + \sum_{l=1 \rightarrow n} \beta_l \Delta BM_{it-l} + \Delta u_{2it} \quad (3.60)$$

- 3) Bentuk persamaan berkendala/*restricted residual sum of squares (RRSS)*

$$\Delta BM_{it} = a_0 + \sum_{k=1 \rightarrow m} a_k \Delta BM_{it-k} + \Delta u_{1it} \quad (3.61)$$

$$\Delta Y_{it} = \alpha_0 + \sum_{k=1 \rightarrow m} \alpha_k \Delta Y_{it-k} + \Delta u_{2it} \quad (3.62)$$

- 4) Uji hipotesis nol dengan statistik F

$$F = \frac{(RRSS - URSS)/m}{URSS/(N - k)} \quad (3.63)$$

3.7.3 Pengujian Arah Kausalitas Penerimaan terhadap PDRB

a. $Y \rightarrow PAD, PAD \rightarrow Y$

- 1) Model dasar;

$$Y_{it} = a_0 + \sum_{k=1 \rightarrow m} a_k Y_{it-k} + \sum_{l=1 \rightarrow n} b_l PAD_{it-l} + u_{1it} \quad (3.64)$$

$$PAD_{it} = \alpha_0 + \sum_{k=1 \rightarrow m} \alpha_k PAD_{it-k} + \sum_{l=1 \rightarrow n} \beta_l Y_{it-l} + u_{2it} \quad (3.65)$$

- 2) Bentuk persamaan tidak berkendala/*unrestricted residual sum of squares (URSS)*

$$\Delta Y_{it} = a_0 + \sum_{k=1 \rightarrow m} a_k \Delta Y_{it-k} + \sum_{1-1 \rightarrow n} b_1 \Delta PAD_{it-1} + \Delta u_{1it} \quad (3.66)$$

$$\Delta PAD_{it} = \alpha_0 + \sum_{k=1 \rightarrow m} \alpha_k \Delta PAD_{it-k} + \sum_{1-1 \rightarrow n} \beta_1 \Delta Y_{it-1} + \Delta u_{2it} \quad (3.67)$$

- 3) Bentuk persamaan berkendala/*restricted residual sum of squares (RRSS)*

$$\Delta Y_{it} = a_0 + \sum_{k=1 \rightarrow m} a_k \Delta Y_{it-k} + \Delta u_{1it} \quad (3.68)$$

$$\Delta PAD_{it} = \alpha_0 + \sum_{k=1 \rightarrow m} \alpha_k \Delta PAD_{it-k} + \Delta u_{2it} \quad (3.69)$$

- 4) Uji hipotesis nol dengan statistik F

$$F = \frac{(RRSS - URSS)/m}{URSS/(N-k)} \quad (3.70)$$

b. $Y \rightarrow BH, BH \rightarrow Y$

- 1) Model dasar;

$$Y_{it} = a_0 + \sum_{k=1 \rightarrow m} a_k Y_{it-k} + \sum_{1-1 \rightarrow n} b_1 BH_{it-1} + u_{1it} \quad (3.71)$$

$$BH_{it} = \alpha_0 + \sum_{k=1 \rightarrow m} \alpha_k BH_{it-k} + \sum_{1-1 \rightarrow n} \beta_1 Y_{it-1} + u_{2it} \quad (3.72)$$

2) Bentuk persamaan tidak berkendala/*unrestricted residual sum of squares (URSS)*

$$\Delta Y_{it} = a_0 + \sum_{k=1 \rightarrow m} a_k \Delta Y_{it-k} + \sum_{l=1 \rightarrow n} b_l \Delta BH_{it-l} + \Delta u_{1it} \quad (3.73)$$

$$\Delta BH_{it} = \alpha_0 + \sum_{k=1 \rightarrow m} \alpha_k \Delta BH_{it-k} + \sum_{l=1 \rightarrow n} \beta_l \Delta Y_{it-l} + \Delta u_{2it} \quad (3.74)$$

3) Bentuk persamaan berkendala/*restricted residual sum of squares (RRSS)*

$$\Delta Y_{it} = a_0 + \sum_{k=1 \rightarrow m} a_k \Delta Y_{it-k} + \Delta u_{1it} \quad (3.75)$$

$$\Delta BH_{it} = \alpha_0 + \sum_{k=1 \rightarrow m} \alpha_k \Delta BH_{it-k} + \Delta u_{2it} \quad (3.76)$$

4) Uji hipotesis nol dengan statistik F

$$F = \frac{(RRSS - URSS)/m}{URSS/(N-k)} \quad (3.77)$$

c. DA → Y, Y → DA

1) Model dasar :

$$DA_{it} = a_0 + \sum_{k=1 \rightarrow m} a_k DA_{it-k} + \sum_{l=1 \rightarrow n} b_l Y_{it-l} + u_{1it} \quad (3.78)$$

$$Y_{it} = \alpha_0 + \sum_{k=1 \rightarrow m} \alpha_k Y_{it-k} + \sum_{l=1 \rightarrow n} \beta_l DA_{it-l} + u_{2it} \quad (3.79)$$

2) Bentuk persamaan tidak berkendala/*unrestricted residual sum of squares (URSS)*

$$\Delta DA_{it} = a_0 + \sum_{k=1 \rightarrow m} a_k \Delta DA_{it-k} + \sum_{l=1 \rightarrow n} b_l \Delta Y_{it-l} + \Delta u_{1it} \quad (3.80)$$

$$\Delta Y_{it} = \alpha_0 + \sum_{k=1 \rightarrow m} \alpha_k \Delta Y_{it-k} + \sum_{l=1 \rightarrow n} \beta_l \Delta DA_{it-l} + \Delta u_{2it} \quad (3.81)$$

3) Bentuk persamaan berkendala/*restricted residual sum of squares (RRSS)*

$$\Delta DA_{it} = a_0 + \sum_{k=1 \rightarrow m} a_k \Delta DA_{it-k} + \Delta u_{1it} \quad (3.82)$$

$$\Delta Y_{it} = \alpha_0 + \sum_{k=1 \rightarrow m} \alpha_k \Delta Y_{it-k} + \Delta u_{2it} \quad (3.83)$$

4) Uji hipotesis nol dengan statistik F

$$F = \frac{(RRSS - URSS)/m}{URSS/(N-k)} \quad (3.84)$$